



LAPORAN AKTUALISASI

Optimalisasi Informasi Titik Parkir Berizin Wilayah Utara Melalui Digitalisasi Aplikasi *Map Marker* Di Dinas Perhubungan Kota Palembang

Oleh:

**TINA AFRIANTI, S.Tr.Tra
NIP. 199704132021022001**

NDH. 36

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN XXV PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI INFORMASI TITIK PARKIR BERIZIN WILAYAH UTARA MELALUI DIGITALISASI APLIKASI *MAP MARKER* DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

Oleh:
TINA AFRIANTI, S.Tr.Tra
NDH: 36

Telah diseminarkan dan disetujui pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Juni 2021
Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

COACH,



Dra. Sugiastuti, S.S., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196307091990032006

MENTOR,



Suhaimi Arsyad, S.Sos
Penata Tingkat 1 (III/d)
NIP. 196808071995031004

Diketahui/Disetujui Oleh:

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial,



Drs. Ahmad Gufnan, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196904241994031004

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI INFORMASI TITIK PARKIR BERIZIN WILAYAH UTARA MELALUI DIGITALISASI APLIKASI *MAP MARKER* DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

Oleh:

TINA AFRIANTI, S.Tr.Tra
NDH: 36

Telah diseminarkan dan disetujui pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Juni 2021
Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

COACH,



Dra. Sugiastuti, S.S.,M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196307091990032006

PENGUJI,



Dr. Ir. Hj. Eva Novaria, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196711111998032002

Diketahui/Disetujui Oleh:

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,



Dj. Tarbiyah, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196410131984062001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi mengenai “Optimalisasi Informasi Titik Parkir Berizin Wilayah Utara Melalui Digitalisasi Aplikasi *Map Marker* di Dinas Perhubungan Kota Palembang”. Adapun tujuan dari kegiatan ini agar penulis dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Penulis menyadari dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, masukan dan semangat pada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Agus Rizal, AP, M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang;
2. Ibu Hj. Tarbiyah, S.Pd., M.M. selaku Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bapak Suhaimi Arsyad S.Sos selaku Kepala UPTD Perparkiran Wilayah Utara Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah meluangkan waktunya mendampingi dan mengarahkan penulis selama penyusunan laporan;
4. Ibu Dra. Sugiasuti, S.S, M.M. selaku *coach* yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan laporan ini;
5. Bapak Ibu Widyaiswara yang memberikan pemahaman terkait konsep ANEKA dalam proses pembelajaran; dan
6. Rekan-rekan Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Sumatera Selatan Golongan III Angkatan XXV Tahun 2021 yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan dalam pembuatan rancangan aktualisasi.

Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penulisan rancangan aktualisasi sebagai salah satu tugas pada pelatihan dasar ini, oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun agar laporan ini dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak.

Palembang, Juni 2021

Penulis

Tina Afrianti, S.Tr.Tra

NIP. 199704132021022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	4
C. Ruang Lingkup.....	5
BAB II DESKRIPSI AKTUALISASI	6
A. Deskripsi Organisasi.....	6
1. Profil Organisasi.....	6
2. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	11
B. Deskripsi Isu/Situasi Problematik.....	15
1. Belum Optimalnya Pelayanan Analisis Dampak Lalu Lintas.....	15
2. Minimnya Informasi Mengenai Titik Parkir Berizin Secara Akurat karena Masih Menggunakan Sistem Pendataan Manual pada Wilayah Utara di Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	16
3. Belum Optimalnya Perawatan Fasilitas Perlengkapan Jalan.....	16
4. Belum Optimalnya Inventarisasi Perlengkapan Jalan di Kota Palembang.....	17
5. Belum Optimalnya Sosialisasi Kepada Pengguna Jalan Mengenai Keselamatan Berlalu Lintas.....	17
C. Analisis Isu.....	18
D. Argumentasi Terhadap Tahapan <i>Core Issue</i> Terpilih.....	20
E. Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS.....	21
1. Keterkaitan Dengan Nilai Nilai Dasar Profesi ASN.....	21
2. Keterkaitan Dengan Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI.....	30
F. Matriks Aktualisasi.....	35

G. Jadwal Aktualisasi.....	44
BAB III PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	45
A. Pendalaman Core Issue Terpilih	45
B. Capaian Kegiatan Aktualisasi.....	68
BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI	18
Tabel II. 2 Analisis Isu Menggunakan Metode AKPK.....	19
Tabel II. 3 Matriks Aktualisasi	35
Tabel II. 4 Jadwal Aktualisasi.....	44
Tabel III. 1 Tabel Capaian Kegiatan Aktualisasi.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Gedung Dinas Perhubungan Kota Palembang	6
Gambar II. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	10
Gambar III. 1 Foto Kegiatan Penyampaian aktualisasi dan meminta saran dan masukan kepada mentor.....	49
Gambar III. 2 Scan Surat Permohonan Izin Kegiatan Aktualisasi dan Lembar Persetujuan Aktualisasi.....	49
Gambar III. 3 Foto Penyusunan Rencana Pengarahan	52
Gambar III. 4 Foto Kegiatan Survei Lapangan.....	55
Gambar III. 5 Kegiatan Pengolahan Data Survei	59
Gambar III. 6 Kuesioner Menggunakan Google Form	63
Gambar III. 7 Hasil Kuesioner Sosialisasi	64
Gambar III. 8 Evaluasi dengan Mentor	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada pasal 10 disebutkan bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsinya tersebut ASN dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar profesi yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan anti Korupsi yang disingkat ANEKA. Selain itu, dapat mengaktualisasikannya dalam memberi pelayanan kepada publik sehingga pelayanan prima bisa terwujud.

Peraturan baru tentang ASN tertuang dalam Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 2014, yang secara implisit menghendaki bahwa ASN yang umum disebut sebagai birokrat bukan sekadar merujuk kepada jenis pekerjaan tetapi merujuk kepada sebuah profesi pelayanan publik.

Selanjutnya pada pasal 63 ayat 3 dan 4 dan tercantum dalam Peraturan Kepala LAN No.1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon PNS dijelaskan bahwa calon PNS wajib menjalani masa pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana lalu lintas adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat

lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan instansi yang mempunyai tugas pokok pemerintah di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan dan pembagian urusan Pemerintah Daerah dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota. Salah satu tugasnya adalah mewujudkan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan ketertiban transportasi. Proses berlalu lintas merupakan suatu bentuk interaksi antara pengguna jalan dengan fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia. Parkir adalah salah satu kegiatan dalam berlalu lintas yang mana membutuhkan fasilitas berupa penyediaan lahan untuk para penggunanya. Untuk meningkatkan pelayanan jasa parkir, maka diperlukan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap juru parkir sebagai wujud untuk menunjang aspek keamanan dan kenyamanan. Parkir yang aman serta berizin merupakan salah satu program Pemerintah Kota Palembang yang bertujuan agar terbebasnya dari pungutan-pungutan pada parkir liar. Tujuan tersebut dapat dipenuhi dengan dukungan inventaris melalui digitalisasi lokasi parkir sehingga didapatkan titik parkir secara akurat pada seluruh jaringan jalan di Kota Palembang.

Parkir merupakan keadaan tidak bergerak setiap kendaraan yang bersifat sementara waktu. Pengertian parkir tersebut jelas berbeda dengan pengertian berhenti yang merupakan keadaan tidak bergerak dalam suatu kendaraan untuk sementara waktu dengan pengemudi yang tidak meninggalkan kendaraan. Kegiatan parkir dapat dilakukan pada badan jalan dan di area parkir khusus diluar badan jalan. Setiap kendaraan yang memarkirkan kendaraannya akan dikenai retribusi parkir yang telah ditentukan pada peraturan daerah, apabila ada oknum yang meminta lebih dari ketentuan yang telah di tentukan oleh peraturan daerah demi mencari keuntungan sendiri maka pungutan tersebut dapat dikatakan sebagai pungutan liar atau pungli. Pungutan liar juga dianggap sebagai pemerasan yang bisa diancam dalam pasal 368 (KUHP).

Penyelenggaraan parkir yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang seringkali menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam penarikan retribusi parkir. Dalam penyelenggaraannya, Dinas Perhubungan menugaskan Juru Parkir berdasarkan Surat Tugas, sehingga bertanggung jawab langsung kepada Dinas Perhubungan. Para juru parkir yang sudah ditugaskan langsung oleh Dinas Perhubungan ternyata tidak menutup kemungkinan untuk tetap melakukan pungutan liar pada titik sekitarnya yang belum didaftarkan secara resmi.

Berkaitan dengan perihal penanganan keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, maka Dinas Perhubungan Kota Palembang berupaya terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di Kota Palembang sehingga diharapkan akan dapat menertibkan juru parkir serta meminimalisir terjadinya pungutan liar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagai seorang Calon PNS, penulis perlu membuat laporan aktualisasi berdasarkan isu-isu aktual yang ada di lingkungan kerja yakni pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN merupakan bukti bahwa seorang ASN sebagai pelayanan masyarakat dapat mengerti dan menghayati nilai-nilai dasar profesi yang telah diberikan.

Kurang optimalnya inventaris lokasi parkir berizin yang berada di Kota Palembang membuat penulis melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan tertibnya parkir-parkir liar. Upaya yang saat ini dilakukan dalam pemenuhan keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan keamanan kegiatan parkir oleh penulis adalah dengan melakukan **Optimalisasi Informasi Titik Parkir Berizin Wilayah Utara Melalui Digitalisasi Aplikasi *Map Marker*** dalam kegiatan habituasi ini.

Sebagai salah satu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas Perhubungan Kota Palembang, penulis perlu menginventarisasi lokasi parkir berizin secara digital agar terwujudnya penertiban parkir liar tanpa izin resmi dalam kegiatan habituasi ini.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penulisan laporan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas ASN agar dapat bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan nilai ANEKA;
- b. Memiliki data sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan yang selanjutnya akan direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan laporan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
 - 1) Dapat menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan peran dan kedudukan ASN di unit kerja;
 - 2) Menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan dalam menginventarisasi titik parkir berizin secara digital di wilayah utara.
- b. Bagi instansi pemerintahan
 - 1) Memiliki data mengenai inventarisasi titik parkir berizin secara digital di wilayah utara Kota Palembang;
 - 2) Dengan adanya inventarisasi titik parkir berizin secara digital pada wilayah utara maka Dinas Perhubungan Kota Palembang memiliki dasar untuk mengambil langkah selanjutnya dalam penetapan titik-titik parkir baru di wilayah utara yang potensial untuk meningkatkan PAD Kota Palembang.
- c. Bagi masyarakat:
 - 1) Meningkatkan ketertiban bagi juru parkir yang belum mendaftarkan titik parkir secara resmi; dan

- 2) Terjaminnya keamanan dan kesesuaian pembayaran tarif parkir pengguna parkir pinggir jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan aktualisasi dan habituasi ini meliputi kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan inventarisasi lokasi parkir berizin secara digital di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kegiatan tersebut berupa implementasi dari nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) yang diterapkan sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), tugas tambahan, visi dan misi instansi serta inisiatif penulis sebagai tenaga teknis di bagian UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, serta melaksanakan peran dan kedudukan ASN yang meliputi Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan *Whole of Government*.

Dalam melaksanakan kegiatan habituasi ini, ada beberapa tahapan dalam kegiatan ini memenuhi aktualisasi ini yaitu:

1. Tahapan Habituasi, dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2021 s.d 09 Juni 2021 bertempat di Dinas Perhubungan Kota Palembang dikhususkan pada perparkiran wilayah utara di Kota Palembang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahapan habituasi ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi titik parkir berizin pada wilayah utara yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual menjadi sistem digital. Kegiatan digitalisasi titik parkir berizin ini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Map Marker*, sehingga *output* yang didapatkan berupa titik parkir yang tepat dan akurat.

BAB II

DESKRIPSI AKTUALISASI

A. Deskripsi Organisasi

1. Profil Organisasi



Gambar II. 1 Gedung Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berawal dari terbentuknya Dinas LLAJ Palembang berubah menjadi Dinas LLAJR wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Dinas 1 LLAJR Tingkat II Kodya Palembang. Dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan Kepala Daerah Tingkat I dan Daerali Tingkat II. Untuk kelancaran taktis administrasi. setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. pada tanggal 26 Maret 1996 cabang Dinas 1 LLAJ Tingkat V. Kodya Palembang Bapak Drs. H. Husni menjadi Dinas LLAJ Kotamadya Tingkat II Palembang yang keberadaannya dibawah Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Otonomi Daerah, berupa istilah menjadi Dinas LLAJ Kota Palembang dan pada bulan Mei Tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang.

b. Visi, Misi, dan Nilai Organisasi

Berdasarkan kondisi, potensial dan hasil kesepakatan *stakeholders* serta tujuan utama dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang, maka visi yang ditetapkan adalah: “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang berkualitas dalam rangka menuju Palembang Emas 2023”.

Pelayanan perhubungan yang berkualitas, diidentifikasi sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Palembang. Pelayanan perhubungan yang adil, diidentifikasi sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang merata dan dapat dijangkau/dirasakan seluruh lapisan masyarakat Kota Palembang. Pelayanan perhubungan yang berwawasan lingkungan, diidentifikasi sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan ramah lingkungan yaitu penyelenggaraan pelayanan baik dalam penambahan sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan pelayanan dengan pengembangan dan penerapan teknologi Transportasi.

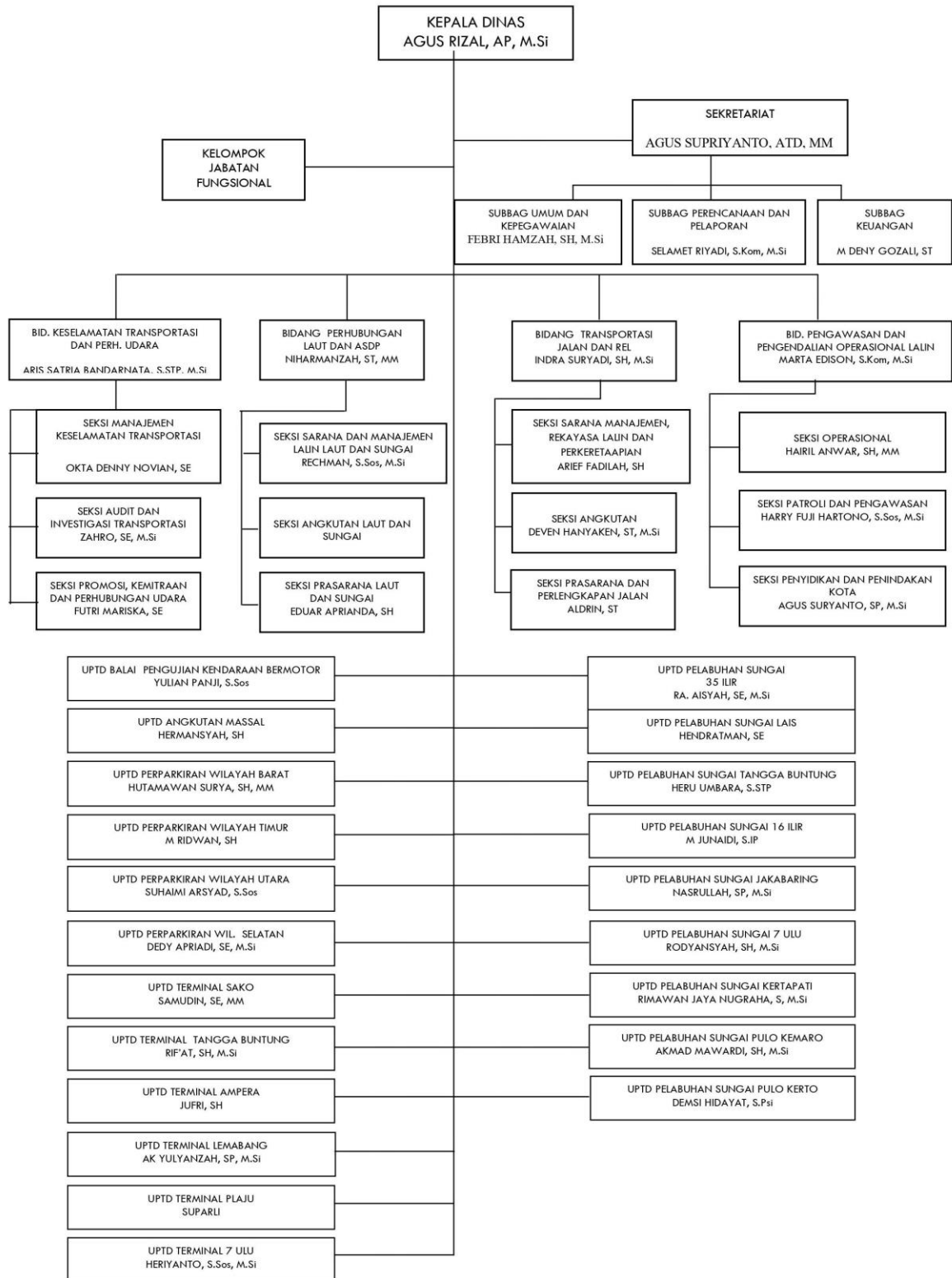
Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Perhubungan Kota Palembang, dirumuskan 2 (dua) Misi sebagai berikut:

- a. Menciptakan ketertiban lalu lintas melalui pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang perhubungan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kualitas sarana prasarana aparatur.
- c. Struktur Organisasi

Pada Peraturan Walikota Palembang nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Palembang. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- 3) Bidang Keselamatan Transportasi dan Keselamatan Udara, membawahi:
 - a) Seksi Manajemen Keselamatan Transportasi;
 - b) Seksi Audit dan Investigasi Transportasi;
 - c) Seksi Promosi, Kemitraan dan Perhubungan Udara.
- 4) Bidang Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahi:
 - a) Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai;
 - b) Seksi Angkutan Laut dan Sungai;
 - c) Seksi Prasarana Laut dan Sungai.
- 5) Bidang Transportasi Jalan dan Rel, membawahi:
 - a) Seksi Sarana Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Perkeretaapian;
 - b) Seksi Angkutan;
 - c) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan;

- 6) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
 - a) Seksi Operasional;
 - b) Seksi Patroli dan Pengawasan;
 - c) Seksi Penyidikan dan Penindakan Kota.
- 7) Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar II. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran yang selanjutnya disebut UPTD Perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran yang merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang.

UPTD Perparkiran terdiri dari:

- a. UPTD Perparkiran Wilayah Selatan;
- b. UPTD Perparkiran Wilayah Utara;
- c. UPTD Perparkiran Wilayah Barat; dan
- d. UPTD Perparkiran Wilayah Timur.

Kedudukan UPTD Dinas Perhubungan secara administratif dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sedangkan dalam kedudukan secara teknis operasional Kepala UPTD Perparkiran dan Terminal dibina oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota.

Susunan organisasi UPTD Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas Teknis Operasional/Koordinator; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban dan pemungutan retribusi parkir, dengan wilayah kerja:

- (1) UPTD Perparkiran Wilayah Selatan membawahi wilayah kerja:
 - a) Jalan KH.Azhari;
 - b) Jalan Wahid Hasyim;
 - c) Jalan Ki Marogan;

- d) Jalan A. Yani;
 - e) Jalan DI.Panjaitan;
 - f.) Jalan Gub. H.Bastari; dan
 - g) ruas jalan lainnya yang berada di wilayah selatan kota.
- (2) UPTD Perparkiran Wilayah Utara membawahi wilayah kerja:
- a) Jalan Jenderal Sudirman simpang Charitas;
 - b) Jalan Kol.H.Burlian;
 - c) Jalan R.Sukamto;
 - d) Jalan Basuki Rahmat;
 - e) Jalan Mayor Salim Batubara;
 - f) Jalan Srijaya Negara;
 - g) Jalan Jaksa Agung R.Suprpto;
 - h) Jalan Demang Lebar Daun;
 - i) Jalan Siaran;
 - j) Jalan Brigjen Hasan Kasim;
 - k) Jalan MP.Mangkunegara;
 - l) Jalan RE.Martadinata;
 - m) Jalan dr.M.Isa; dan
 - n) ruas jalan lainnya yang berada di wilayah utara kota.
- (3) UPTD Perparkiran Wilayah Barat membawahi wilayah kerja:
- a) Jalan Jenderal Sudirman / sisi kiri;
 - b) Jalan KH.A.Dahlan;
 - c) Jalan Radial;
 - d) Jalan Kapt.A.Rivai;

a. Tugas dan Fungsi Kepala UPTD Perparkiran

Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan se bagian tugas operasional Dinas Perhubungan di bidang

pengelolaan perparkiran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD Perparkiran mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan perparkiran di wilayah kerja masing-masing;
- 2) pemberian atau penyediaan lahan parkir umum di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan;
- 3) perencanaan lokasi atau tempat parkir di wilayah kerja masing-masing;
- 4) pembinaan dan pengarahan kepada Juru parkir di wilayah kerja masing-masing;
- 5) pengawasan dan pengendalian kepentingan pengguna jasa parkir di wilayah kerja masing-masing;
- 6) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya;
- 7) pemantauan ketertiban dan keamanan lokasi perparkiran di wilayah kerja masing-masing;
- 8) pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- 9) penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

b. Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai

dengan bidang tugasnya;

- 2) penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- 3) penyusunan data lokasi perpakiran di wilayah kerja masing-masing;
- 4) penyusunan administrasi keuangan;
- 5) pengelolaan urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- 6) perencanaan kebutuhan karcis parkir, karcis retribusi parkir khusus, petak dan lahan parkir serta dokumen lainnya;
- 7) pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas parkir, rambu lalu lintas dan fasilitas lainnya di wilayah kerja masing-masing;
- 8) perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun;
- 9) penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- 10) penyusunan laporan penerimaan retribusi; dan

c. Tugas dan Fungsi Petugas Teknis Operasional/Koordinator

Petugas Teknis Operasional/Koordinator tugas melaksanakan pengaturan, penertiban pemungutan retribusi perparkiran pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Petugas Teknis Operasional/Koordinator mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan pengaturan dan penertiban parkir di wilayah kerja masing-masing;
- 2) pelaksanaan pemungutan retribusi Jasa pelayanan parkir di wilayah kerja masing-masing;
- 3) pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan pelanggaran perparkiran di wilayah kerja masing-masing;

- 4) pengkoordinasian pelaksanaan tugas juru parkir di wilayah kerja masing-masing;
- 5) pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

d. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Perpajakan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan tugasnya.

B. Deskripsi Isu/Situasi Problematik

Pengertian isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak. Dalam hal ini, isu yang muncul digunakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa program yang belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil konsultasi kepada mentor dan pengamatan langsung di lapangan, situasi problematik yang terjadi di Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Analisis Dampak Lalu Lintas

Dalam pemberian izin kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur (dengan kriteria tertentu) diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang ditimbulkan baik pada saat pembangunan maupun setelah pembangunan. Kurang optimalnya pelayanan analisis dampak lalu lintas di Kota Palembang disebabkan oleh kurangnya pemahaman para *stakeholder* dan instansi yang

terlibat dalam pembangunan dan belum tersedianya standar operasional prosedur terkait pelayanan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.

Kondisi yang diharapkan: Tersedia Standar Operasional Prosedur yang jelas dan sudah disosialisasikan terutama ke instansi-instansi terkait.

Isu ini terkait dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu pelayanan publik dan *Whole of Government*.

2. Minimnya Informasi Mengenai Titik Parkir Berizin Secara Akurat karena Masih Menggunakan Sistem Pendataan Manual pada Wilayah Utara di Dinas Perhubungan Kota Palembang

Inventarisasi lokasi parkir berizin diperlukan untuk mengetahui jumlah titik parkir yang sudah memiliki izin sesuai dengan peta digital yang berada pada wilayah utara di Kota Palembang. Kurang optimalnya terkait inventarisasi lokasi parkir berizin secara digital berdampak pada sulitnya pemantauan secara langsung di lapangan mengenai lokasi pasti titik parkir yang sudah mengantongi izin atau titik parkir liar.

Kondisi yang diharapkan: Optimalnya Informasi Titik Parkir Berizin Melalui Digitalisasi pada Wilayah Utara di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Isu ini terkait dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan *Whole of Government*

3. Belum Optimalnya Perawatan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Selain melakukan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan, Dinas Perhubungan juga bertanggung jawab menjaga dan merawat fasilitas perlengkapan jalan. Kurangnya perawatan fasilitas perlengkapan jalan dapat berpengaruh pada keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Kondisi yang diharapkan: Terawatnya fasilitas perlengkapan jalan. Isu ini terkait dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu pelayanan publik.

4. Belum Optimalnya Inventarisasi Perlengkapan Jalan di Kota Palembang

Inventarisasi perlengkapan jalan diperlukan untuk mengetahui jumlah dan kondisi perlengkapan jalan yang berada di wilayah Kota Palembang. Kurang optimalnya terkait inventarisasi perlengkapan jalan berdampak pada sulitnya pemantauan kondisi, perawatan serta penetapan lokasi dan rencana pengadaan perlengkapan jalan.

Kondisi yang diharapkan: Optimalnya Inventaris Perlengkapan Jalan di Kota Palembang.

Isu ini terkait dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu pelayanan publik.

5. Belum Optimalnya Sosialisasi Kepada Pengguna Jalan Mengenai Keselamatan Berlalu Lintas

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas ditunjukkan oleh banyaknya pengguna jalan yang tidak menggunakan helm, tidak memasang spion, dan berjalan melawan arah. Ketidakpedulian masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas ini dapat memicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Kondisi yang diharapkan: Optimalnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi rambu dan marka dalam berlalu lintas agar menjadi pengguna jalan yang berkeselamatan.

Isu ini terkait dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik.

Tabel II. 1 Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI

No	Isu	Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	Kondisi yang diharapkan
1	Belum Optimalnya Pelayanan Analisis Dampak Lalu Lintas	Pelayanan Publik dan <i>Whole of Government</i>	Tersedia Standar Operasional Prosedur yang jelas dan sudah disosialisasikan terutama ke instansi-instansi terkait
2	Minimnya Informasi Mengenai Titik Parkir Berizin Secara Akurat karena Masih Menggunakan Sistem Pendataan Manual pada Wilayah Utara di Dinas Perhubungan Kota Palembang	Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan <i>Whole of Government</i>	Optimalnya Informasi Titik Parkir Berizin Melalui Digitalisasi pada Wilayah Utara di Dinas Perhubungan Kota Palembang
3	Belum Optimalnya Perawatan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Pelayanan Publik	Terawatnya fasilitas perlengkapan jalan
4	Belum Optimalnya Inventarisasi Perlengkapan Jalan di Kota Palembang	Pelayanan Publik	Optimalnya Inventaris Perlengkapan Jalan di Kota Palembang
5	Belum Optimalnya Sosialisasi Kepada Pengguna Jalan Mengenai Keselamatan Berlalu Lintas	Manajemen ASN & Pelayanan Publik	Optimalnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi rambu dan marka dalam berlalu lintas agar menjadi pengguna jalan yang berkeselamatan

C. Analisis Isu

Berdasarkan identifikasi dan pemetaan isu diatas, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode analisis AKPK untuk menentukan isu terpilih. Adapun kriteria instrumen yang digunakan untuk penilaian dalam metode AKPK adalah sebagai berikut:

1. Aktual : Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat.
2. Kekhalayakan: Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Problematik : Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya sesegera mungkin.
4. Kelayakan : Isu yang masuk akal, realitis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Pembobotan dan analisis AKPK menggunakan Skala Likert dengan skala nilai 1-5.

Keterangan:

- 5 = sangat kuat pengaruhnya
- 4 = kuat pengaruhnya
- 3 = sedang pengaruhnya
- 2 = kurang pengaruhnya
- 1 = sangat kurang pengaruhnya

Berikut adalah analisis isu-isu di atas dengan menggunakan instrumen AKPK.

Tabel II. 2 Analisis Isu Menggunakan Metode AKPK

No	ISU	A 1-5	K 1-5	P 1-5	K 1-5	Jumlah	Peringkat
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Analisis Dampak Lalu Lintas	3	4	4	3	14	4
2.	Minimnya Informasi Mengenai Titik Parkir Berizin Secara Akurat karena Masih Menggunakan Sistem Pendataan Manual pada Wilayah Utara di Dinas Perhubungan Kota Palembang	4	5	5	5	19	1

No	ISU	A 1-5	K 1-5	P 1-5	K 1-5	Jumlah	Peringkat
3.	Belum Optimalnya Perawatan Fasilitas Perlengkapan Jalan	3	4	3	3	13	5
4.	Belum Optimalnya Inventarisasi Perlengkapan Jalan di Kota Palembang	4	4	4	4	16	2
5.	Belum Optimalnya Sosialisasi Kepada Pengguna Jalan Mengenai Keselamatan Berlalu Lintas	4	4	4	3	15	3

Berdasarkan analisis isu menggunakan metode AKPK maka isu yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya yaitu Kurang Optimalnya Inventarisasi Lokasi Parkir Berizin. sehingga diperoleh judul **“OPTIMALISASI INFORMASI TITIK PARKIR BERIZIN WILAYAH UTARA MELALUI DIGITALISASI APLIKASI MAP MARKER DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG”**.

D. Argumentasi Terhadap Tahapan *Core Issue* Terpilih

ASN sebagai penyelenggara pemerintahan salah satu tugasnya sebagai pelayan publik memiliki kewajiban menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik agar dilaksanakan dengan profesional sehingga dapat memuaskan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan hak penduduk dan warga negara yg merupakan amanat konstitusi, pada kondisinya saat ini mungkin belum terpenuhi atau mungkin sudah terpenuhi tapi belum

optimal. Sebagai ASN, menyediakan layanan publik yang berkualitas merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Setelah dilakukan analisis kriteria isu dengan alat analisis AKPK, kemudian selanjutnya didapatkan *Core Issue* terpilih “Minimnya Informasi Mengenai Titik Parkir Berizin Secara Akurat karena Masih Menggunakan Sistem Pendataan Manual pada Wilayah Utara di Dinas Perhubungan Kota Palembang”.

Isu ini di ambil karena dinilai penting dalam permasalahan dasar di lapangan. Kurangnya informasi mengenai lokasi parkir yang akurat sering menimbulkan konflik kepemilikan lahan parkir serta sulit membedakan titik parkir yang resmi ataupun parkir liar. Sehingga Inventarisasi Lokasi Parkir Berizin Melalui Digitalisasi merupakan langkah awal untuk mengetahui jumlah titik-titik parkir yang sudah mendapatkan izin resmi serta dapat mengetahui lokasi titik-titik parkir potensial yang belum masuk ke dalam daftar titik berizin agar dapat meningkatkan PAD Kota Palembang.

Dinas Perhubungan wajib memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan salah satunya dengan melengkapi prasarana transportasi. Sesuai dengan tupoksi perihal perparkiran, hal ini sesuai dengan aturan UU No. 22 Tahun 2009. Dengan adanya inventarisasi lokasi titik parkir berizin secara digital, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membasmi pungutan liar dan salah satu tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan PAD di Kota Palembang.

E. Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS

1. Keterkaitan Dengan Nilai Nilai Dasar Profesi ASN

Nilai-nilai dasar adalah nilai yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan profesi PNS secara professional sebagai pelayan masyarakat, nilai-nilai itu diantaranya Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Kelima nilai- nilai dasar ini untuk selanjutnya diakronimkan menjadi ANEKA yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam memberikan pertanggung jawaban bagi setiap instansi maupun individu (Modul Akuntabilitas, 2017). Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:

- 1) Mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar saat terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik, kelompok, dan pribadi.
- 2) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.
- 3) Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 4) Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas *stakeholder*.

1) Akuntabilitas Personal (*Personal Accountability*),

Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah.

2) Akuntabilitas Individu

Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta

menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya.

3) Akuntabilitas Kelompok

Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Berkaitan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan.

4) Akuntabilitas Organisasi

Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada *stakeholder* lainnya.

5) Akuntabilitas *Stakeholder*

Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Kepemimpinan
- 2) Transparansi
- 3) Integritas
- 4) Tanggung Jawab
- 5) Keadilan
- 6) Kepercayaan
- 7) Keseimbangan

- 8) Kejelasan dan
- 9) Konsistensi

b. Nasionalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Setiap Pegawai Negeri Sipil harus menanamkan jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan publik. Untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 10, Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai:

- 1) Pelaksana kebijakan publik.
- 2) Sebagai pelayan publik.
- 3) Sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam mengimplementasikan rasa nasionalisme oleh ASN sesuai dengan butir-butir dalam Pancasila, maka setiap ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pelaksanaan kebijakan publik wajib menjaga dan mengamalkan nilai-nilai ANEKA dalam kehidupan sehari-hari.

1. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan Nasionalisme

Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila oleh ASN sudah memiliki azas dan prinsip Nasionalisme yang secara nyata dilakukan pada setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia. ASN dalam pelaksanaan tugasnya dan dalam kehidupan keseharian di lingkungannya wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan melakukan penumbuhan sikap nasionalisme pada saat bekerja di kantor, keluarga, dan lingkungannya.

Pancasila memiliki Nilai-Nilai Nasionalisme yaitu:

- a) Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Jujur dan mempunyai integritas;
 - Hormat pada hak orang lain;
 - Hormat pada aturan & hukum masyarakat;
 - Punya etika;
 - Tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya;
 - Sabar;
 - Jiwa besar;
 - Berprasangka baik.
- b) Sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - Tidak dzalim;
 - Sopan/santun;
 - Saling tolong menolong.
- c) Sila ke-3 Persatuan Indonesia
 - Rukun & damai;
 - Menjaga keutuhan bangsa;
 - Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara
- d) Sila Ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah
 - Kebijakan dalam Permusyawaratan/perwakilan
 - Mau mendengar pendapat orang lain;
 - Siap menang, tetapi juga siap kalah;

- Sportif;
 - Selalu sesuai aturan main/mematuhi undang-undang yang berlaku;
 - Bertanggung jawab;
 - Tolong Menolong;
 - Tidak anarkis.
- e) Sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Tidak serakah;
 - Tepat waktu;
 - Mau bekerja keras;
 - Saling membantu;
 - Suka menabung & investasi.

2. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik

Setiap ASN wajib mengimplementasikan kebijakan publik, dan ASN juga harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan publik, antara lain:

- a) ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tanpa ada implementasi maka suatu kebijakan publik hanya menjadi angan-angan belaka, sehingga karena itu harus dioperasionalisasikan;
- b) ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Setiap pegawai ASN harus menyadari sebagai aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada Negara dan aturan perundang-undangan.
- c) ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud

keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.

3. ASN sebagai pelayan publik

Dalam pelaksanaan tugasnya ASN merupakan pelayan publik dan melakukannya sesuai dengan prinsip dan azas pelayanan publik. Tata laksana pelayanan publik dan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik oleh ASN merupakan cerminan *good governance* dan *good government* yang merupakan perwujudan sikap Nasionalisme. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi maka ASN dapat melakukan sebagai berikut:

- a) Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan;
- b) Senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

c. Etika Publik

Etika publik merupakan refleksi atau standar tindakan keputusan, perilaku untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab penilaian publik (Modul Etika Publik, 2017). Nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni memegang teguh nilai-nilai

dalam ideologi Negara Pancasila, menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, dan cepat.

Nilai dasar yang terkandung pada etika publik:

- 1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara pancasila;
- 2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 3) Menjalankan tugas secara Profesional dan tidak berpihak;
- 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- 5) Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- 6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur;
- 7) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- 8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- 9) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasil guna dan santun;
- 10) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- 11) Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
- 12) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- 13) Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir

d. Komitmen Mutu

Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil (Modul Komitmen Mutu, 2017). Target utama aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap aparatur diharuskan mewujudkan sikap kreatif, inovatif, melayani dengan

sikap hormat, bertutur kata sopan dan ramah, adil dan tidak diskriminatif. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah:

- 1) Efektifitas, sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya;
- 2) Efisiensi, seberapa banyak jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi;
- 3) Inovasi, kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya; dan
- 4) Mutu, persepsi orang secara individual, yang diukur dari tingkat kepuasan masing-masing terhadap produk/ jasa yang diterimanya.

e. Anti Korupsi

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: "Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara".

Sedangkan anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, antikorupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Nilai-nilai yang terkandung dalam anti korupsi yaitu:

- 1) Jujur, dengan menyampaikan apa adanya tidak melebih-lebihkan.
- 2) Peduli, memiliki sifat kasih sayang dalam segala hal.

- 3) Mandiri, sedikit sekali ketergantungan kepada orang lain dan mengerjakan dengan kemampuan sendiri.
- 4) Disiplin, setiap saat mampu mengembangkan potensi diri secara konsisten dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu.
- 5) Tanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya demi tugas yang diembannya.
- 6) Kerja keras, selalu berupaya meningkatkan kualitas kerja demi terwujudnya kemanfaatan publik.
- 7) Sederhana, dengan menerapkan prinsip tidak berlebih-lebihan.
- 8) Berani, mampu menyampaikan kebenaran dan menolak kebatilan dalam tekanan.
- 9) Adil, mampu mengendalikan diri dan apa yang diterima sesuai dengan jerih payahnya.

2. Keterkaitan Dengan Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI

Selain nilai-nilai dasar PNS, ada 3 hal utama yang perlu dipahami dan diimplementasikan seorang PNS dalam kesehariannya ketika menjalankan tugas negara, yaitu pemahaman tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan *whole of government*.

a. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN (Modul Manajemen ASN, 2017). Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pemerintah mengatur ASN melalui UU Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan UU ASN, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksana kebijakan publik
- 2) Pelayan publik
- 3) Perekat dan pemersatu bangsa

Dalam undang-undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN:

- 1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
- 2) Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin.
- 3) Melayani dengan sikap hormat, sopan dan, tanpa tekanan.
- 4) Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang.
- 6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
- 7) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien.
- 8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- 9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi.
- 10) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara.
- 11) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
- 12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

b. Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik mengandung:

1) Konsep dan Prinsip Pelayanan Publik

ASN sebagai penyelenggara pemerintahan salah satu tugasnya sebagai pelayan publik memiliki kewajiban menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat karena masyarakat telah membayar pajak ke negara. Penyelenggaraan pelayanan publik agar dilaksanakan dengan profesional sehingga dapat memuaskan masyarakat. Proses pelayanan publik dilakukan dengan prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: Partisipatif, Transparan, Responsif, Tidak diskriminatif, Mudah dan Murah, Efektif dan efisien, Aksesibel, Akuntabel dan Berkeadilan.

Adapun Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain:

- a) Responsif terhadap pelanggan/memahami pelanggan;
- b) Membangun visi dan misi pelayanan;
- c) Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, sebagai dasar pemberian pelayanan;
- d) Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, serta pemahaman tugas dan fungsi organisasi;
- e) Memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik.

2) Pola pikir ASN Sebagai Pelayan Publik

Dalam pelayanan publik masih dirasakan belum maksimal yang diterima oleh masyarakat, hal ini karena cara kerja Pelayanan Birokrasi masih terjangkau “Penyakit” sehingga perlu perubahan dalam pola pikir ASN sebagai Pelayan Publik. Pendekatan pertama yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah dengan menanamkan pola pikir ASN Pelayanan Publik, dengan menanamkan bahwa pelayanan publik merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan hak penduduk dan warga negara yg merupakan amanat konstitusi, pada kondisinya saat ini mungkin belum terpenuhi atau mungkin sudah terpenuhi tapi belum optimal.

ASN harus memenuhi kebutuhan dan hak warga negara, karena warga negara sudah membayar pajak, dan Gaji ASN dibayar dari hasil pajak dari masyarakat. Untuk membangun budaya pelayanan yang baik adalah dengan:

- a) Pahami kembali hakekat dari Pelayanan Publik;
- b) Biasakan Berorientasi Kepuasan Masyarakat;
- c) Membiasakan Perilaku Pelayanan Prima.

3) Etiket pelayanan

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, maka seorang ASN agar dapat menerapkan Kode Etik ASN sebagai berikut:

- a) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c) melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

- e) melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f) menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

c. *Whole of Government*

WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan *interagency*, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan relevan. WOG menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas sector atau lintas batas guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu (Modul *Whole of Government*, 2017).

F. Matriks Aktualisasi

Setelah menentukan isu yang akan dibahas pada kegiatan aktualisasi, tahapan selanjutnya adalah membuat rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan kegiatan pada penulisan laporan ini akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II. 3 Matriks Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Mata Diklat	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Merancang/men desain rencana optimalisasi informasi titik parkir wilayah utara melalui digitalisasi aplikasi map marker di dinas perhubungan kota Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang/men desain rencana kegiatan aktualisasi 2. Menghadap Kepala UPTD Perparkiran Wilayah Utara selaku mentor 3. Melakukan koordinasi kepada mentor terkait penyampaian rencana dan rancangan kegiatan aktualisasi 	<p>Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kepada mentor terkait rancangan kegiatan aktualisasi</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat izin aktualisasi / habituasi 2. Dokumentasi 	<p>Keterkaitan dengan nilai ANEKA:</p> <p>Akuntabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung Jawab: dalam melaksanakan koordinasi timbul kesadaran untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas 2. Kepercayaan: kepercayaan terhadap intruksi dari atasan dan kepercayaan atasan terhadap bawahan <p>Nasionalisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah: Melakukan musyawarah dengan atasan untuk mencapai kesepakatan bersama. 2. Hormat menghormati: menghormati dalam kegiatan diskusi dengan atasan dan menerima keputusan yang diperoleh. 	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan pencapaian Visi melalui misi Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Melalui kegiatan ini, memunculkan nilai-nilai koordinasi, kerja sama, dan tanggung jawab dalam penyelesaian tugas sehingga membentuk SDM yang kompeten dan profesional.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Mata Diklat	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Etika Publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai komunikasi konsultasi dan kerja sama: melaksanakan koordinasi untuk bermusyawarah dalam penyelesaian tugas <p>Komitmen Mutu:</p> <p>Perbaikan yang berkelanjutan: dilihat dari pelaksanaan kegiatan yaitu dengan adanya koordinasi ini maka secara berkesinambungan menjaga serta memperbaiki kualitas/mutu dalam bekerja dengan prinsip seefektif mungkin</p> <p>Anti Korupsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung Jawab: Melalui kegiatan ini, masing-masing diberikan tanggung jawab untuk bersama-sama menyelesaikan tugas 2. Peduli: peduli akan isu yang ada di masyarakat dan berkoordinasi dengan tujuan menyelesaikan isu tersebut <p><u>Keterkaitan dengan Agenda, Peran dan Kedudukan ASN:</u></p> <p>Manajemen ASN:</p> <p>Melalui koordinasi, pimpinan dapat memberikan pengarahan dan pembinaan kepada ASN dalam melaksanakan kegiatan</p>		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Mata Diklat	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
2	Menyusun persiapan pengarahan (<i>briefing</i>) mengenai teknis survei kepada anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan bahan-bahan terkait pemberian arahan kepada anggota terkait teknis survei 2. Menghadap Kepala UPTD Perpustakaan Wilayah Utara selaku mentor 3. Menyampaikan rencana pengarahan survei yang akan dilakukan kepada anggota 	<p>Terlaksananya koordinasi kepada mentor mengenai teknis survei yang akan dilakukan</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat izin melaksanakan survei; 2. Dokumentasi 	<p><u>Keterkaitan dengan Nilai ANEKA:</u></p> <p>Akuntabilitas: Tanggung jawab: Adanya kesadaran seorang ASN untuk bertanggungjawab memberikan kejelasan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Nasionalisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dipercaya: menggunakan informasi secara benar. 2. Kerja Keras: bekerja dengan cermat dalam melaksanakan tugas. <p>Etika Publik: Sopan: Menyampaikan informasi kepada Kepala UPTD Perpustakaan Wilayah Utara selaku Mentor dengan sopan.</p> <p>Komitmen Mutu: Berorientasi mutu: berusaha memberikan pelayanan terbaik.</p> <p>Anti Korupsi: Tanggung Jawab: Melalui kegiatan ini, masing-masing diberikan tanggung jawab untuk bersama-sama menyelesaikan tugas</p> <p><u>Keterkaitan dengan Agenda, Peran dan Kedudukan ASN:</u></p> <p>Manajemen ASN: Melalui koordinasi dengan pimpinan dan memberikan pengarahan dan</p>	Melalui kegiatan koordinasi ini ikut berkontribusi dalam mewujudkan misi Dinas Perhubungan Kota Palembang yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Melalui kegiatan ini, memunculkan nilai-nilai koordinasi, kerja sama, dan tanggung jawab dalam penyelesaian tugas sehingga membentuk SDM yang kompeten dan profesional.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Mata Diklat	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				pembinaan kepada anggota dalam melaksanakan kegiatan		
3	Melakukan pengarahan (<i>briefing</i>) teknis survei dan penggunaan aplikasi <i>Map Marker</i> serta pelaksanaan survei inventarisasi	<ol style="list-style-type: none"> Pengarahan ke anggota terkait teknis melakukan survei menggunakan aplikasi <i>Map Marker</i> Menuju lokasi survei masing-masing sesuai pembagian lokasi Melaksanakan survei inventarisasi lokasi parkir berizin pada wilayah utara menggunakan aplikasi <i>Map Marker</i> 	<p>Terlaksananya survei inventarisasi lokasi parkir berizin pada wilayah utara di Kota Palembang</p> <p>Bukti</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi Kegiatan 	<p>pembinaan kepada anggota dalam melaksanakan kegiatan</p> <p>Keterkaitan dengan nilai ANEKA:</p> <p>Akuntabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab: Kegiatan survei ini merupakan salah satu wujud responsible terhadap tugas yang telah ditetapkan Kejelasan: dari kegiatan ini didapatkan kejelasan antara informasi yang didapatkan dan data yang sebenarnya di lapangan <p>Nasionalisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> Integritas : integritas anggota terhadap perintah atasan Bertanggung jawab : akan tugas yang di berikan kepada masing-masing <p>Etika Publik:</p> <p>Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan</p> <p>Komitmen Mutu:</p> <p>Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin: kegiatan ini melatih agar kita selalu cermat dan teliti dalam penyusunan laporan dan juga disiplin saat penyampaian laporan.</p> <p>Anti Korupsi:</p> <p>Kejujuran: kejujuran dari hasil survei dan kegiatan yang dilakukan di lapangan</p>	Melalui kegiatan ini ikut berkontribusi dalam mewujudkan misi Dinas Perhubungan Kota Palembang yaitu Menciptakan ketertiban lalu lintas melalui pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan.	Melalui kegiatan ini, memunculkan nilai-nilai koordinasi, kerja sama, dan tanggung jawab, serta disiplin dalam penyelesaian tugas sehingga membentuk SDM yang kompeten dan profesional.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Mata Diklat	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p><u>Keterkaitan dengan Agenda, Peran dan Kedudukan ASN :</u> Manajemen ASN: Kegiatan survei ini memberikan pengarahan teknis pelaksanaan survey</p> <p>Pelayanan Publik: upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang berkualitas</p>		
4.	Mengolah data hasil survei inventarisasi berdasarkan hasil penggunaan aplikasi <i>Map Marker</i>	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data hasil survei inventarisasi dari para anggota Menganalisis data hasil survei inventarisasi pada aplikasi <i>Map Marker</i> Menyusun hasil digitalisasi ke dalam satu folder Menyampaikan hasil digitalisasi titik parkir kepada Kepala UPTD 	<p>Terlaksananya analisis dan pengolahan data hasil survei menggunakan aplikasi <i>Map Marker</i></p> <p>Bukti: 1. Hasil pemetaan digitalisasi titik parkir wilayah utara</p>	<p><u>Keterkaitan dengan nilai ANEKA:</u> Akuntabilitas: 1. Tanggung Jawab: pelaksanaan nilai tanggung jawab disini dengan melakukan analisis terkait data-data yang telah dikumpulkan 2. Kepercayaan: percaya akan hasil yang telah didapatkan dari survei dilapangan</p> <p>Nasionalisme: Tanggung Jawab: bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab</p> <p>Etika Publik: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan Berintegritas tinggi: melalui evaluasi ini diharapkan kesadaran diri dalam menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan integritas.</p>	Proses analisis ini diharapkan mampu berkontribusi dalam perwujudan Misi Dinas Perhubungan yaitu Menciptakan ketertiban lalu lintas melalui pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan.	Melalui kegiatan ini, memunculkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme dalam penyelesaian tugas sehingga dapat memberikan hasil pengolahan data yang bermanfaat.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Mata Diklat	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		Perparkiran Wilayah Utara selaku mentor		<p>Komitmen Mutu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektif, efisien, inovatif dan berorientasi mutu: melalui kegiatan evaluasi ini memiliki nilai-nilai di atas yang merupakan hasil dari evaluasi agar dapat lebih efektif dalam pencapaian tujuan. 2. Komitmen dan Konsistensi <p>Anti Korupsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian: melalui kegiatan ini maka terdapat nilai kepedulian terhadap sesama sehingga mampu mencapai hasil yang ditetapkan . 2. Tanggung Jawab: melalui kegiatan tersebut meningkatkan tanggung jawab akan melaksanakan kegiatan <p><u>Keterkaitan dengan Agenda, Peran dan Kedudukan ASN:</u></p> <p>Manajemen ASN: Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN dapat bekerja sesuai dengan porsinya dan melakukan analisis data sesuai dengan apa yang telah di dapatkan di lapangan</p> <p>Whole Of Government (WoG): Melalui kegiatan, pengolahan data tersebut menggunakan aplikasi <i>Map Marker</i></p>		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Mata Diklat	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
5.	Melakukan sosialisasi terkait hasil digitalisasi titik survei dan teknis penggunaan hasil digitalisasi kepada anggota	<ol style="list-style-type: none"> Menghadap Kepala UPTD Perparkiran Wilayah Utara selaku mentor untuk memberikan arahan kepada anggota terkait hasil digitalisasi titik parkir Menjelaskan kepada anggota terkait hasil digitalisasi titik parkir Memberikan arahan kepada anggota mengenai teknik penggunaan hasil digitalisasi titik parkir di lapangan Memberikan kuisisioner kepada anggota terkait keadaan sesudah dan 	<p>Terlaksananya sosialisasi terkait hasil digitalisasi titik survei dan teknis penggunaannya kepada anggota</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi Kegiatan Hasil Kuisisioner 	<p>Keterkaitan dengan nilai ANEKA:</p> <p>Akuntabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab: Kegiatan ini merupakan salah satu wujud responsible terhadap pencapaian dari tugas yang telah ditetapkan Kejelasan: dari kegiatan ini didapatkan kejelasan antara informasi yang didapatkan dan data hasil digitalisasi <p>Nasionalisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> Integritas : integritas anggota terhadap perintah atasan Bertanggung jawab : akan menyampaikan informasi yang didapat kepada masing-masing <p>Etika Publik:</p> <p>Menghargai komunikasi antara dua pihak dalam penyampaian hasil kegiatan yang didapatkan</p> <p>Komitmen Mutu:</p> <p>Inovasi: kegiatan digitalisasi yang dilakukan lebih baik dan praktis dari sistem sebelumnya</p> <p>Anti Korupsi:</p> <p>Kejujuran: kejujuran dalam pengisian kuisisioner terkait asanya hasil digitalisasi</p>	Proses analisis ini diharapkan mampu berkontribusi dalam perwujudan Misi Dinas Perhubungannya yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Melalui kegiatan ini, memunculkan nilai-nilai koordinasi, kerja sama, dan tanggung jawab dalam penyelesaian tugas sehingga membentuk SDM yang kompeten dan profesional.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Mata Diklat	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		sebelum adanya hasil digitalisasi titik parkir		<p><u>Keterkaitan dengan Agenda, Peran dan Kedudukan ASN :</u></p> <p>Manajemen ASN: Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, serta memberikan informasi secara benar</p> <p>Pelayanan Publik: Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang lebih baik dan inovatif</p>		
6.	Evaluasi kepada mentor mengenai hasil digitalisasi titik parkir berizin	1. Evaluasi ke mentor mengenai kesimpulan dari hasil digitalisasi titik parkir	<p>Terlaksananya evaluasi hasil digitalisasi yang telah dilakukan</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen hasil Kegiatan Dokumentasi Kegiatan 	<p><u>Keterkaitan dengan nilai ANEKA:</u></p> <p>Akuntabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab timbul kesadaran untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas Kepercayaan: kepercayaan terhadap instruksi dari atasan dan kepercayaan atasan terhadap bawahan <p>Nasionalisme: Gotong Royong: saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas</p> <p>Etika Publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Taat perintah: melaksanakan segala perintah yang diberikan untuk bermusyawarah dalam penyelesaian tugas Disiplin: menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan jadwal yang 	Proses ini diharapkan mampu berkontribusi dalam perwujudan Misi Dinas Perhubungan yaitu Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.	Melalui kegiatan ini, memunculkan nilai-nilai koordinasi, kerja sama, profesionalisme dan tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Mata Diklat	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>telah ditetapkan.</p> <p>Komitmen Mutu: Perbaikan yang berkelanjutan: dilihat dari pelaksanaan kegiatan yaitu dengan adanya koordinasi ini maka secara berkesinambungan menjaga serta memperbaiki kualitas/mutu dalam bekerja</p> <p>Anti Korupsi: Tanggung Jawab: Melalui kegiatan ini, masing-masing diberikan tanggung jawab untuk bersama-sama menyelesaikan tugas</p> <p><u>Keterkaitan dengan Agenda, Peran dan Kedudukan ASN:</u> Manajemen ASN: Melalui kegiatan ini, pimpinan dapat melihat langsung hasil kegiatan sehingga dapat memberikan intruksi selanjutnya untuk kegiatan tersebut</p> <p>Pelayanan Publik: Rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan publik.</p>		

G. Jadwal Aktualisasi

Pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan berdasarkan jadwal yang akan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II. 4 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No.	Tahapan Kegiatan	Mei				Juni	
		Minggu ke-1	Minggu ke-2	Minggu ke-3	Minggu ke-4	Minggu ke-1	Minggu ke-2
1.	Merancang/mendesain rencana optimalisasi informasi titik parkir wilayah utara melalui digitalisasi aplikasi <i>Map Marker</i> di Dinas Perhubungan Kota Palembang	03 – 04 Mei 2021					
2.	Menyusun persiapan pengarahan (<i>briefing</i>) mengenai teknis survei kepada anggota	05 Mei 2021					
3.	Melakukan pengarahan (<i>briefing</i>) teknis survei dan penggunaan aplikasi <i>Map Marker</i> serta pelaksanaan survei inventarisasi		06 – 21 Mei 2021				
4.	Mengolah data hasil survei inventarisasi berdasarkan hasil penggunaan aplikasi <i>Map Marker</i>				24 Mei – 04 Juni 2021		
5.	Melakukan sosialisasi terkait hasil digitalisasi titik survei dan teknis penggunaan hasil digitalisasi kepada anggota						07 - 08 Juni 2021
6.	Evaluasi kepada mentor mengenai hasil survei inventarisasi titik parkir						09 Juni 2021

BAB III

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Pendalaman *Core Issue* Terpilih

Berdasarkan pemetaan dan analisis isu yang dilakukan, diketahui *core issue* yang teridentifikasi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah **“Minimnya Informasi Mengenai Titik Parkir Berizin Secara Akurat karena Masih Menggunakan Sistem Pendataan Manual pada Wilayah Utara di Dinas Perhubungan Kota Palembang”**. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan solusi dari *core issue* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merancang/mendesain rencana optimalisasi informasi titik parkir wilayah utara melalui digitalisasi aplikasi *Map Marker* di Dinas Perhubungan Kota Palembang;
2. Menyusun persiapan pengarahan (*briefing*) mengenai teknis survei kepada anggota;
3. Melakukan pengarahan (*briefing*) teknis survei dan penggunaan aplikasi *Map Marker* serta pelaksanaan survei inventarisasi;
4. Mengolah data hasil survei inventarisasi berdasarkan hasil penggunaan aplikasi *Map Marker*;
5. Melakukan sosialisasi terkait hasil digitalisasi titik survei dan teknis penggunaan hasil digitalisasi kepada anggota;
6. Evaluasi ke mentor mengenai hasil dari kegiatan survei inventarisasi lokasi titik parkir berizin.

Penerapan aktivitas-aktivitas pemecahan *core issue* terdiri dari beberapa kegiatan yang tujuannya menemukan solusi dari isu yang diangkat. Masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan dituangkan dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

1. KEGIATAN 1

Kegiatan	Merancang/mendesain rencana optimalisasi informasi titik parkir wilayah utara melalui digitalisasi aplikasi <i>Map Marker</i>
Tanggal	03 Mei 2021 – 04 Mei 2021
Daftar Lampiran	Foto Kegiatan & dokumen

1. Internalisasi Nilai-nilai Dasar Profesi

Nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat dalam kegiatan Merancang/mendesain rencana optimalisasi informasi titik parkir wilayah utara melalui digitalisasi aplikasi *Map Marker* yaitu:

a. Akuntabilitas:

Tanggung Jawab: dalam melaksanakan koordinasi timbul kesadaran untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas

Kepercayaan: kepercayaan terhadap intruksi dari atasan dan kepercayaan atasan terhadap bawahan.

b. Nasionalisme:

Musyawarah: Melakukan musyawarah dengan atasan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Hormat menghormati: menghormati dalam kegiatan diskusi dengan atasan dan menerima keputusan yang diperoleh.

c. Etika Publik:

Menghargai komunikasi konsultasi dan kerja sama: melaksanakan koordinasi untuk bermusyawarah dalam penyelesaian tugas.

d. Komitmen Mutu:

Perbaikan yang berkelanjutan: dilihat dari pelaksanaan kegiatan yaitu dengan adanya koordinasi ini maka secara

berkesinambungan menjaga serta memperbaiki kualitas/mutu dalam bekerja dengan prinsip seefektif mungkin

e. Anti Korupsi:

Tanggung Jawab: Melalui kegiatan ini, masing-masing diberikan tanggung jawab untuk bersama-sama menyelesaikan tugas

Peduli: peduli akan isu yang ada di masyarakat dan berkoordinasi dengan tujuan menyelesaikan isu tersebut

Keterkaitan dengan Nilai Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI :

a. Manajemen ASN:

Melalui koordinasi, pimpinan dapat memberikan pengarahan dan pembinaan kepada ASN dalam melaksanakan kegiatan

2. Deskripsi Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan ini meliputi membuat rancangan rencana kegiatan aktualisasi, menghadap Kepala UPTD Perparkiran Wilayah selaku mentor, menyampaikan rencana dan rancangan aktualisasi, menyampaikan permohonan izin kegiatan aktualisasi.

3. Kualitas Produk Kegiatan

Dengan adanya kegiatan Merancang/mendesain rencana optimalisasi informasi titik parkir wilayah utara melalui digitalisasi aplikasi *Map Marker* maka dapat diperoleh *output* kegiatan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan izin kegiatan aktualisasi;
- b. Lembar persetujuan aktualisasi;
- c. Foto/video kegiatan.

4. Kontribusi Kegiatan terhadap Capaian Visi Misi Organisasi

Proses kegiatan merancang/mendesain rencana optimalisasi informasi titik parkir wilayah utara melalui digitalisasi aplikasi *Map Marker* bertujuan untuk memecahkan isu yang ada sehingga

bermanfaat dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Kegiatan koordinasi dan konsultasi ini mendukung pelaksanaan pencapaian Visi Dinas Perhubungan Kota Palembang melalui misi “Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur”

5. Kontribusi Kegiatan terhadap Nilai – Nilai Organisasi

Tata nilai organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang mengacu pada 5 Citra Manusia Perhubungan. Melalui kegiatan ini akan menguatkan nilai-nilai koordinasi, kerja sama, dan tanggung jawab dalam penyelesaian tugas sehingga membentuk SDM yang kompeten dan profesional.

6. Analisis Dampak

Dampak Positif:

Dampak dari kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada mengenai kegiatan aktualisasi adalah tersusunnya rencana kegiatan secara tepat, sistematis, sesuai arahan, serta telah diketahui dan disetujui oleh atasan sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dampak Negatif

Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada sulitnya melaksanakan kegiatan aktualisasi selama masa habituasi karena tidak adanya koordinasi yang baik antara penulis, mentor maupun rekan sejawat lainnya.




7. Kendala dan Solusi

Tidak ada kendala.

Bukti Kegiatan



Gambar III. 1 Foto Kegiatan Penyampaian aktualisasi dan meminta saran dan masukan kepada mentor

<p style="text-align: center;">Kepada Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang di - PALEMBANG</p> <p>Perihal : Permohonan Izin Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Tina Afrianti, S.Tr.Tra NIP : 199704132021022001 Pangkat/Golongan : Pemeriksa (III/a) Jabatan : Bendahara UPTD Perparkiran Wilayah Utara</p> <p>Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan agenda III Kegiatan Aktualisasi (Habituasasi di Tempat Kerja) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari tanggal 03 Mei 2021 s.d 09 Juni 2021 sesuai dengan program aktualisasi yang berjudul "Optimalisasi Informasi Titik Parkir Bertarif Wilayah Utara Melalui Digitalisasi Aplikasi <i>Map Marker</i> di Dinas Perhubungan Kota Palembang".</p> <p>Demikian surat permohonan izin ini saya buat, atas persetujuan Bapak saya ucapkan terimakasih.</p> <p style="text-align: right;">Palembang, Mei 2021</p> <p style="text-align: right;"> TINA AFRIANTI, S.Tr.Tra NIP. 199704132021022001</p>	<div style="text-align: center;">  PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PERHUBUNGAN <small>Jalan Pangrango Sido Ing Lauan 35 Iir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0711) 441175 Faksimile : (0711) 442547 kode pos 30146 E-mail : dshub_palembang@pnhko.co.id Website : www.dshub.palembang.go.id</small> </div> <p style="text-align: center;">SURAT IZIN KEGIATAN Nomor : 695 / 01.650- / 1</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama : AGUS SUPRIYANTO, ATD, MM NIP : 196908011992031006 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b Jabatan : Sekretaris Dinas Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Palembang</p> <p>Dengan ini memberikan izin kepada :</p> <p>Nama : TINA AFRIANTI, S.Tr. Tra NIP : 199704132021022001 Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a Jabatan : Bendahara UPTD Perparkiran Wilayah Utara Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Palembang</p> <p>Untuk melakukan kegiatan Aktualisasi (Habituasasi) Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tanggal 03 Mei 2021 s.d 09 Juni 2021 sesuai dengan program aktualisasi saudara berjudul "Optimalisasi Informasi Titik Parkir Bertarif Wilayah Utara Melalui Digitalisasi Aplikasi <i>Map Marker</i> di Dinas Perhubungan Kota Palembang".</p> <p>Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Palembang, 10 Mei 2021</p> <p style="text-align: right;">An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG SEKRETARIS,  AGUS SUPRIYANTO, ATD, MM Pembina Tk. I NIP. 196908011992031006</p>
--	--

Gambar III. 2 Scan Surat Permohonan Izin Kegiatan Aktualisasi dan Lembar Persetujuan Aktualisasi

2. KEGIATAN 2

Kegiatan	Menyusun persiapan pengarahan (<i>briefing</i>) mengenai teknis survei kepada anggota
Tanggal	05 Mei 2021
Daftar Lampiran	Foto Kegiatan

1. Internalisasi Nilai-nilai Dasar Profesi

Nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat dalam kegiatan Menyusun persiapan pengarahan (*briefing*) mengenai teknis survei kepada anggota yaitu:

a. Akuntabilitas:

Tanggung Jawab: Adanya kesadaran seorang ASN untuk bertanggungjawab memberikan kejelasan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

b. Nasionalisme:

Dapat dipercaya: menggunakan informasi secara benar.

Kerja Keras: bekerja dengan cermat dalam melaksanakan tugas.

c. Etika Publik:

Sopan: Menyampaikan informasi kepada Kepala UPTD Perparkiran Wilayah Utara selaku Mentor dengan sopan.

d. Komitmen Mutu:

Berorientasi mutu: berusaha memberikan pelayanan terbaik

e. Anti Korupsi:

Tanggung Jawab: Melalui kegiatan ini, masing-masing diberikan tanggung jawab untuk bersama-sama menyelesaikan tugas.

Keterkaitan dengan Nilai Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI :

a. Manajemen ASN:

Melalui koordinasi dengan pimpinan dan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada anggota dalam melaksanakan kegiatan.

2. Deskripsi Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan ini meliputi membuat rancangan rencana kegiatan aktualisasi, mempersiapkan bahan-bahan terkait pemberian arahan kepada anggota terkait teknis survei, menghadap Kepala UPTD Perparkiran Wilayah Utara selaku mentor, menyampaikan rencana survei yang akan dilakukan.

3. Kualitas Produk Kegiatan

Dengan adanya kegiatan menyusun persiapan pengarahan (*briefing*) mengenai teknis survei kepada anggota maka dapat diperoleh *output* kegiatan sebagai berikut:

a. Foto/video kegiatan.

4. Kontribusi Kegiatan terhadap Capaian Visi Misi Organisasi

Proses kegiatan menyusun persiapan pengarahan (*briefing*) mengenai teknis survei kepada anggota bertujuan untuk memecahkan isu yang ada sehingga bermanfaat dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Kegiatan ini mendukung pelaksanaan pencapaian Visi Dinas Perhubungan Kota Palembang melalui misi “Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur”

5. Kontribusi Kegiatan terhadap Nilai Organisasi

Tata nilai organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang mengacu pada 5 Citra Manusia Perhubungan. Melalui kegiatan ini akan menguatkan nilai-nilai koordinasi, kerja sama, dan tanggung jawab dalam penyelesaian tugas sehingga membentuk SDM yang kompeten dan profesional.

6. Analisis Dampak

Dampak Positif:

Dampak positif dari kegiatan penyusunan persiapan pengarahan (*briefing*) adalah tersusunnya rencana penyampaian teknis kegiatan survei yang akan dilaksanakan secara tepat, sistematis, sesuai arahan, serta telah diketahui dan disetujui oleh atasan sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dampak Negatif

Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada sulitnya melaksanakan kegiatan aktualisasi selama masa habituasi karena tidak pahamnya tim surveyor mengenai teknis survei yang akan dilaksanakan dan tujuan dari pelaksanaan survei.

7. Kendala dan Solusi

Tidak ada kendala.

Bukti Kegiatan



Gambar III. 3 Foto Penyusunan Rencana Pengarahan

3. KEGIATAN 3

Kegiatan	Melakukan pengarahan (<i>briefing</i>) teknis survei dan penggunaan aplikasi <i>Map Marker</i> serta pelaksanaan survei inventarisasi lokasi parkir
Tanggal	06 Mei – 21 Mei 2021
Daftar Lampiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Melaksanakan Survei 2. Dokumentasi pelaksanaan survei
<p>1. Internalisasi Nilai-nilai Dasar Profesi</p> <p>Nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat dalam kegiatan Melakukan pengarahan (<i>briefing</i>) teknis survei dan penggunaan aplikasi <i>Map Marker</i> serta pelaksanaan survei inventarisasi lokasi parkir yaitu:</p> <p>a. <u>Akuntabilitas:</u></p> <p>Tanggung Jawab: Kegiatan survei ini merupakan salah satu wujud responsible terhadap tugas yang telah ditetapkan</p> <p>Kejelasan: dari kegiatan ini didapatkan kejelasan antara informasi yang didapatkan dan data yang sebenarnya di lapangan</p> <p>b. <u>Nasionalisme:</u></p> <p>Integritas: integritas anggota terhadap perintah atasan</p> <p>Bertanggung jawab: akan tugas yang di berikan kepada masing-masing.</p> <p>c. <u>Etika Publik:</u></p> <p>Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan.</p> <p>d. <u>Komitmen Mutu:</u></p> <p>Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin: kegiatan ini melatih agar kita selalu cermat dan teliti dalam penyusunan laporan dan juga disiplin saat penyampaian laporan</p>	

e. Anti Korupsi:

Kejujuran: kejujuran dari hasil survei dan kegiatan yang dilakukan di lapangan.

Keterkaitan dengan Nilai Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI:

a. Manajemen ASN:

Kegiatan survei ini memberikan pengarahan teknis pelaksanaan survey.

b. Pelayanan Publik:

upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang berkualitas.

2. Deskripsi Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan ini meliputi pengarahan ke anggota terkait teknis melakukan survei menggunakan aplikasi *Map Marker*, menuju lokasi survei masing-masing sesuai pembagian lokasi, melaksanakan survei inventarisasi lokasi parkir berizin pada wilayah utara menggunakan aplikasi *Map Marker*.

3. Kualitas Produk Kegiatan

Dengan adanya kegiatan Melakukan pengarahan (*briefing*) teknis survei dan penggunaan aplikasi *Map Marker* serta pelaksanaan survei inventarisasi lokasi parkir maka dapat diperoleh data-data akurat lokasi parkir sesuai dengan aplikasi. Kegiatan ini menghasilkan:

1. Surat izin melaksanakan survei
2. Foto dokumentasi pelaksanaan survei

4. Kontribusi Kegiatan terhadap Capaian Visi Misi Organisasi

Melalui kegiatan ini ikut berkontribusi dalam mewujudkan misi Dinas Perhubungan Kota Palembang yaitu "Menciptakan ketertiban lalu lintas melalui pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan"

5. Kontribusi Kegiatan terhadap Nilai Organisasi

Melalui kegiatan ini, memunculkan nilai-nilai koordinasi, kerja sama, dan tanggung jawab, serta disiplin dalam penyelesaian tugas sehingga membentuk SDM yang kompeten dan profesional.

6. Analisis Dampak

Dampak Positif

Dampak dari kegiatan pengarahan (*briefing*) ini adalah agar para anggota surveyor mengetahui sasaran dari survei inventarisasi dan teknis pengambilan data melalui aplikasi *Map Marker* serta lokasi pengambilan data inventarisasi titik parkir ini.

Dampak Negatif

Jika kegiatan pengarahan teknis survei dan penggunaan aplikasi *Map Marker* serta pelaksanaan survei inventarisasi ini tidak dilakukan maka akan berdampak kepada seluruh anggota yang akan melaksanakan survei inventarisasi yang mana akan menimbulkan kebingungan mengenai teknis pelaksanaan survei dan tujuan yang harus diambil dalam pelaksanaan survei

7. Kendala dan Solusi

Tidak ada kendala.

Bukti Kegiatan



Gambar III. 4 Foto Kegiatan Survei Lapangan

4. KEGIATAN 4

Kegiatan	Mengolah data hasil survei inventarisasi berdasarkan hasil penggunaan aplikasi <i>Map Marker</i>
Tanggal	24 Mei – 04 Juni 2021
Daftar Lampiran	1. Dokumentasi Kegiatan

1. Internalisasi Nilai-nilai Dasar Profesi

Nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat dalam kegiatan Mengolah data hasil survei inventarisasi berdasarkan hasil penggunaan aplikasi *Map Marker* yaitu:

a. Akuntabilitas:

Tanggung Jawab: pelaksanaan nilai tanggung jawab disini dengan melakukan analisis terkait data-data yang telah dikumpulkan

Kepercayaan: percaya akan hasil yang telah didapatkan dari survei lapangan

b. Nasionalisme:

Tanggung Jawab: bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab

c. Etika Publik:

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi: melalui evaluasi ini diharapkan kesadaran diri dalam menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan integritas

d. Komitmen Mutu:

Efektif, efisien, inovatif dan berorientasi mutu : melalui kegiatan evaluasi ini memiliki nilai-nilai diatas yang merupakan hasil dari evaluasi agar dapat lebih efektif dalam pencapaian tujuan.

e. Anti Korupsi:

Kepedulian: melalui kegiatan ini maka terdapat nilai kepedulian terhadap sesama sehingga mampu mencapai hasil yang ditetapkan.

Tanggung Jawab: melalui kegiatan tersebut meningkatkan tanggung jawab akan melaksanakan kegiatan.

Keterkaitan dengan Nilai Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI :

a. Manajemen ASN:

Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN dapat bekerja sesuai dengan porsinya dan melakukan analisis data sesuai dengan apa yang telah didapatkan di lapangan

b. Pelayanan Publik:

Rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan publik.

c. Whole of Government:

Melalui kegiatan, pengolahan data tersebut menggunakan aplikasi *Map Marker*.

2. Deskripsi Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan ini meliputi mengumpulkan data hasil survei inventarisasi dari para anggota, menganalisis data hasil survei inventarisasi pada aplikasi *Map Marker*, menyusun hasil digitalisasi ke dalam satu folder, menyampaikan hasil digitalisasi titik parkir kepada Kepala UPTD Perparkiran Wilayah Utara selaku mentor.

3. Kualitas Produk Kegiatan

Dengan adanya kegiatan mengolah data hasil survei inventarisasi berdasarkan hasil penggunaan aplikasi *Map Marker* maka dapat diperoleh data titik yang *up to date*. Kegiatan ini menghasilkan:

1. Peta digital lokasi titik parkir berizin
2. Foto/video kegiatan

4. Kontribusi Kegiatan terhadap Capaian Visi Misi Organisasi

Proses analisis ini diharapkan mampu berkontribusi dalam perwujudan Misi Dinas Perhubungan yaitu “Menciptakan ketertiban lalu lintas melalui pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan”.

5. Kontribusi Kegiatan terhadap Nilai Organisasi

Tata nilai organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang mengacu pada 5 Citra Manusia Perhubungan. Melalui kegiatan ini, memunculkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme dalam penyelesaian tugas sehingga dapat memberikan hasil pengolahan data yang bermanfaat.

6. Analisis Dampak

Dampak Positif

Dampak dari kegiatan ini yaitu tersusunnya/terolahnya data yang didapatkan oleh para surveyor mengenai lokasi titik parkir berizin yang ada pada wilayah utara di Kota Palembang menggunakan aplikasi *Map Marker*.

Dampak Negatif

Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan maka dokumen mengenai data inventaris titik parkir berizin pada wilayah utara di Kota Palembang tidak dapat didapatkan serta tidak dapat memecahkan *Core Issue* yang terpilih.

7. Kendala dan Solusi

Tidak ada kendala.

Bukti Kegiatan**Gambar III. 5** Kegiatan Pengolahan Data Survei

5. KEGIATAN 5

Kegiatan	Melakukan sosialisasi terkait hasil digitalisasi titik survei dan teknis penggunaan hasil digitalisasi kepada anggota
Tanggal	07 - 08 Juni 2021
Daftar Lampiran	1. Hasil Kuesioner 2. Dokumentasi Kegiatan
<p>1. Internalisasi Nilai-nilai Dasar Profesi</p> <p>Nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat dalam kegiatan Melakukan sosialisasi terkait hasil digitalisasi titik survei dan teknis penggunaan hasil digitalisasi kepada anggota yang telah disetujui yaitu:</p> <p>a. <u>Akuntabilitas:</u></p> <p>Tanggung Jawab: Kegiatan ini merupakan salah satu wujud responsible terhadap pencapaian dari tugas yang telah ditetapkan</p> <p>Kejelasan: dari kegiatan ini didapatkan kejelasan antara informasi yang didapatkan dan data hasil digitalisasi.</p> <p>b. <u>Nasionalisme:</u></p> <p>Integritas : integritas anggota terhadap perintah atasan</p> <p>Bertanggung jawab : akan menyampaikan informasi yang didapat kepada masing-masing.</p> <p>c. <u>Etika Publik:</u></p> <p>Menghargai komunikasi antara dua pihak dalam penyampaian hasil kegiatan yang didapatkan</p> <p>d. <u>Komitmen Mutu:</u></p> <p>Inovasi: kegiatan digitalisasi yang dilakukan lebih baik dan praktis dari sistem sebelumnya</p>	

e. Anti Korupsi:

Kejujuran: kejujuran dalam pengisian kuisisioner terkait asanya hasil digitalisasi

Keterkaitan dengan Nilai Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI :**a. Manajemen ASN:**

Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, serta memberikan informasi secara benar

b. Pelayanan Publik:

Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang lebih baik dan inovatif.

2. Deskripsi Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan ini meliputi menghadap Kepala UPTD Perpustakaan Wilayah Utara selaku mentor untuk memberikan sosialisasi kepada anggota terkait hasil digitalisasi titik parkir, menjelaskan kepada anggota terkait hasil digitalisasi titik parkir, memberikan arahan kepada anggota mengenai teknik penggunaan hasil digitalisasi titik parkir di lapangan, memberikan kuesioner kepada anggota terkait keadaan sesudah dan sebelum adanya hasil digitalisasi titik parkir.

3. Kualitas Produk Kegiatan

Dengan adanya kegiatan Melakukan sosialisasi terkait hasil digitalisasi titik survei dan teknis penggunaan hasil digitalisasi kepada anggota maka para pihak yang akan terkait dengan hasil digitalisasi titik parkir telah mengetahui cara penggunaan dari hasil digitalisasi menggunakan aplikasi *Map Marker*. Kegiatan ini menghasilkan:

1. Hasil Kuesioner
2. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi

4. Kontribusi Kegiatan terhadap Capaian Visi Misi Organisasi

Kegiatan ini diharapkan mampu berkontribusi dalam perwujudan Misi Dinas Perhubungan yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur”.

5. Kontribusi Kegiatan terhadap Nilai Organisasi

Tata nilai organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang mengacu pada 5 Citra Manusia Perhubungan. Melalui kegiatan ini, memunculkan nilai-nilai koordinasi, kerja sama, profesionalisme dan tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.

6. Analisis Dampak**Dampak Positif**

Dampak positif dari kegiatan ini agar anggota di UPTD Wilayah Utara Dinas Perhubungan Kota yang akan melaksanakan survei ke lapangan dapat mengetahui secara pasti lokasi dari titik parkir berizin di wilayah utara, sehingga bisa juga memudahkan untuk mengetahui lokasi titik parkir liar yang belum terdaftar.

Dampak Negatif

Adapun dampak negatif apabila kegiatan ini tidak dilakukan maka anggota staf di UPTD Perparkiran wilayah utara tidak memahami cara penggunaan dari aplikasi *Map Marker* untuk mengetahui lokasi titik parkir yang sudah resmi terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

7. Kendala dan Solusi

Tidak ada kendala.

Bukti Kegiatan

**KUESIONER EVALUASI DIGITALISASI
TITIK PARKIR WILAYAH UTARA**

* Wajib

Nama *

Jawaban Anda _____

Unit Kerja *

Jawaban Anda _____

Apakah hasil digitalisasi titik parkir sudah jelas dan bisa dimengerti? *

Sangat Tidak Jelas

Tidak Jelas

Cukup Jelas

Sangat Jelas

Seberapa pentingkah menurut anda digitalisasi titik parkir menggunakan Aplikasi Map Marker? *

Sangat Tidak Penting

Tidak Penting

Cukup Penting

Sangat Penting

Apakah anda bersedia menggunakan Aplikasi Map Marker pada saat diperlukan untuk bekerja? *

Tidak Bersedia

Mungkin Bersedia

Sangat Bersedia

Bagaimana menurut pendapat anda mengenai digitalisasi titik parkir menggunakan Aplikasi Map Marker? *

Sangat Tidak Membantu

Tidak Membantu

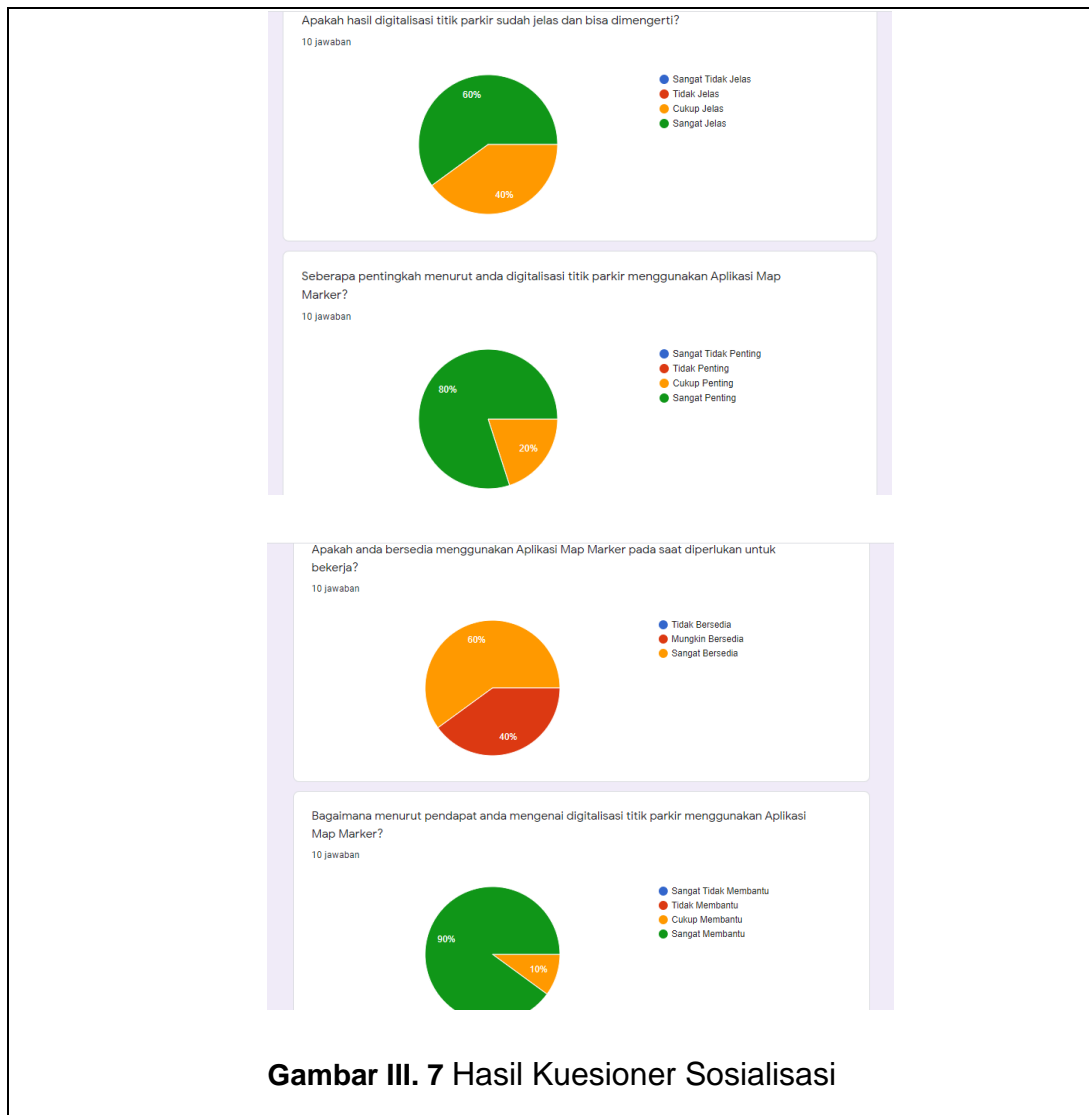
Cukup Membantu

Sangat Membantu

Kritik dan saran *

Jawaban Anda _____

Gambar III. 6 Kuesioner Menggunakan Google Form



6. KEGIATAN 6

Kegiatan	Evaluasi kepada mentor mengenai hasil digitalisasi titik parkir berizin
Tanggal	09 Juni 2021
Daftar Lampiran	1. Laporan hasil aktualisasi 2. Dokumentasi kegiatan

1. Internalisasi Nilai-nilai Dasar Profesi

Nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdapat dalam kegiatan Evaluasi kepada mentor mengenai hasil digitalisasi titik parkir berizin yaitu:

a. Akuntabilitas

Tanggung Jawab: timbul kesadaran untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas

Kepercayaan: kepercayaan terhadap instruksi dari atasan dan kepercayaan atasan terhadap bawahan.

b. Nasionalisme

Gotong Royong: saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas.

c. Etika Publik

Taat perintah: melaksanakan segala perintah yang diberikan untuk bermusyawarah dalam penyelesaian tugas

Disiplin: menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

d. Komitmen Mutu

Perbaikan yang berkelanjutan: dilihat dari pelaksanaan kegiatan yaitu dengan adanya koordinasi ini maka secara berkesinambungan menjaga serta memperbaiki kualitas/mutu dalam bekerja.

e. Anti Korupsi

Tanggung Jawab: Melalui kegiatan ini, masing-masing

diberikan tanggung jawab untuk bersama-sama menyelesaikan tugas

Keterkaitan dengan Nilai Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI :

a. Manajemen ASN

Melalui kegiatan ini, pimpinan dapat melihat langsung hasil kegiatan sehingga dapat memberikan intruksi selanjutnya untuk kegiatan tersebut Rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan publik.

b. Pelayanan Publik

Rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan publik

2. Deskripsi Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan ini meliputi konsultasi dengan *coach* dan mentor serta pembahasan usulan tindak lanjut, dan mengumpulkan seluruh hasil kegiatan yang telah dilakukan dan Pembuatan laporan hasil aktualisasi.

3. Kualitas Produk Kegiatan

Dengan adanya kegiatan Evaluasi kepada mentor mengenai hasil digitalisasi titik parkir berizin maka dapat diketahui tingkat keberhasilan sosialisasi dan selesainya kegiatan aktualisasi. Kegiatan ini menghasilkan:

1. Foto kegiatan
2. Laporan hasil aktualisasi
3. Lembar konsultasi dengan mentor

4. Kontribusi Kegiatan terhadap Capaian Visi Misi Organisasi

Kegiatan ini diharapkan mampu berkontribusi dalam perwujudan Misi Dinas Perhubungan yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur”.

5. Kontribusi Kegiatan terhadap Nilai Organisasi

Tata nilai organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang mengacu pada 5 Citra Manusia Perhubungan. Melalui kegiatan ini, memunculkan nilai-nilai koordinasi, kerja sama, profesionalisme dan tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.

6. Analisis Dampak

Dampak Positif

Dampak dari kegiatan evaluasi ini adalah agar informasi mengenai inventarisasi titik parkir berizin yang ada pada Wilayah Utara di Kota Palembang menjadi lebih baik dapat dikoreksi oleh mentor apabila ada kekurangan dan segera diperbaiki agar inventarisasi ini menjadi lebih optimal.

Dampak Negatif

Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan maka koordinasi antara penulis dan mentor menjadi tidak baik. Evaluasi ini diperlukan agar nilai keabsahan dokumen tersebut menjadi valid, apabila mentor tidak mengetahui isi dokumen tersebut maka keabsahan dokumen inventaris tersebut menjadi tidak valid.

7. Kendala dan Solusi

Tidak ada kendala.

Bukti Kegiatan



Gambar III. 8 Evaluasi dengan Mentor

B. Capaian Kegiatan Aktualisasi

Dalam deskripsi kegiatan aktualisasi menjelaskan tentang kegiatan secara umum yaitu tahapan kegiatan dan kaitannya dengan nilai dasar profesi ASN ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi), peran dan kedudukan ASN, dan capaian terhadap visi dan misi organisasi, serta analisis dampak yang mungkin ditimbulkan jika kegiatan tidak dilaksanakan. Kegiatan aktualisasi di tempat kerja (*off campus*) dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Palembang yang dimulai dari tanggal **03 Mei 2021 sampai dengan 09 Juni 2021 (selama 23 hari)**. Perkembangan setiap kegiatan dilaporkan kepada mentor dan *coach* guna memperoleh saran yang diperlukan selama pelaksanaan aktualisasi. Berikut adalah tabel capaian kegiatan yang menjelaskan tentang kegiatan dan lamanya waktu pelaksanaan serta persentase capaian yang telah di raih selama kegiatan aktualisasi di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Perkembangan kegiatan aktualisasi didiskusikan dan dikonsultasikan dengan mentor dan *coach* untuk mendapatkan masukan yang diperlukan selama kegiatan habituasi sehingga mampu mendukung visi dan misi serta memperkuat nilai organisasi yang terdapat di Dinas Perhubungan . Adapun capaian kegiatan aktualisasi dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III. 1 Tabel Capaian Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Target	Output	Persentase Pencapaian	Keterangan
1.	Merancang/mendesain rencana optimalisasi informasi titik parkir wilayah utara melalui digitalisasi aplikasi <i>Map Marker</i> di Dinas Perhubungan Kota Palembang	03 – 04 Mei 2021	8,69%	1. Surat permohonan izin aktualisasi 2. Surat izin melaksanakan aktualisasi 3. Dokumentasi	100%	Tercapai
2.	Menyusun persiapan pengarahan (<i>briefing</i>) mengenai teknis survei kepada anggota	05 Mei 2021	4,3%	1. Surat Izin Melaksanakan Survei 2. Dokumentasi Kegiatan	100%	Tercapai
3.	Melakukan pengarahan (<i>briefing</i>) teknis survei dan penggunaan aplikasi <i>Map Marker</i> serta pelaksanaan survei inventarisasi	06 – 21 Mei 2021	39,13%	1. Dokumentasi Kegiatan	100%	Tercapai
4.	Mengolah data hasil survei inventarisasi berdasarkan hasil penggunaan aplikasi <i>Map Marker</i>	24 Mei – 04 Juni 2021	34,78%	1. Data Inventarisasi Lokasi Parkir Berizin 2. Dokumentasi Kegiatan	100%	Tercapai
5.	Melakukan sosialisasi terkait hasil digitalisasi titik survei dan teknis penggunaan hasil digitalisasi kepada anggota	07 - 08 Juni 2021	8,69%	1. Hasil Kuesioner 2. Dokumentasi Kegiatan	100%	Tercapai
6.	Evaluasi kepada mentor mengenai hasil digitalisasi titik parkir berizin	09 Juni 2021	4,3%	1. Dokumen Hasil Kegiatan 2. Dokumentasi Kegiatan	100%	Tercapai

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan aktualisasi ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis atas kegiatan yang telah dilakukan pada masa habituasi, yaitu dari tanggal 03 Mei 2021 s.d. 09 Juni 2021. Dari kegiatan habituasi yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tercapainya kegiatan Optimalisasi Informasi Titik Parkir Berizin Wilayah Utara Melalui Digitalisasi Aplikasi *Map Marker* di Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai ASN mampu menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) dan Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI dan selanjutnya dapat bekerja lebih profesional dan berkarakter.
2. Dengan tersedianya digitalisasi titik parkir resmi pada wilayah utara maka dapat dijadikan acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk mengetahui titik-titik parkir resmi yang sudah terdaftar dengan lokasi yang akurat dan tepat.
3. Melalui sosialisasi penggunaan hasil digitalisasi titik parkir berizin di wilayah utara, maka dapat diketahui pemahaman dari pegawai yang ada di UPTD Perpustakaan Wilayah Utara mengenai penggunaan hasil digitalisasi titik parkir berizin menggunakan Aplikasi *Map Marker* saat di lapangan ataupun untuk kepentingan administrasi sehingga lebih efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, di antaranya:

1. Bagi penulis selaku Staf pada UPTD Perparkiran Wilayah Utara untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam upaya meningkatkan kinerja di Dinas Perhubungan Kota Palembang.
2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai lokasi kegiatan habituasi, agar dapat menerapkan hasil digitalisasi lokasi parkir berizin dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap titik-titik parkir baru untuk dilakukan updating/penyesuaian dengan kondisi lapangan.
3. Setiap ASN hendaknya selalu menerapkan nilai-nilai ANEKA dalam menjalankan kewajibannya, sehingga dapat terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengabdikan kepada negara.
4. Setiap ASN hendaknya selalu menerapkan nilai-nilai *Whole of Government*, Manajemen ASN dan Pelayanan Publik, sehingga dapat terwujud ASN yang siap melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Kepala LAN No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS.

KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik.

Peraturan Walikota Palembang No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Kota Palembang dalam Angka Tahun 2020.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Akuntabilitas. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Nasionalisme. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Etika Publik. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Komitmen mutu. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Anti Korupsi. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Manajemen Aparatur Sipil Negara. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Pelayanan Publik. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Aktualisasi

Perihal : Permohonan Izin Melaksanakan
Kegiatan Aktualisasi

Kepada
Yth. **Kepala Dinas Perhubungan
Kota Palembang**

di -

PALEMBANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tina Afrianti, S.Tr.Tra
NIP : 199704132021022001
Pangkat/Golongan : Pemeriksa (III/a)
Jabatan : Bendahara UPTD Perparkiran Wilayah Utara

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan agenda III Kegiatan Aktualisasi (Habituaasi di Tempat Kerja) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari tanggal 03 Mei 2021 s.d 09 Juni 2021 sesuai dengan program aktualisasi yang berjudul "Optimalisasi Informasi Titik Parkir Berizin Wilayah Utara Melalui Digitalisasi Aplikasi *Map Marker* di Dinas Perhubungan Kota Palembang".

Demikian surat permohonan izin ini saya buat, atas persetujuan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Palembang, Mei 2021



TINA AFRIANTI, S.Tr.Tra
NIP. 199704132021022001

Lampiran 2 Surat Izin Kegiatan



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 441175 Faksimile : (0711) 442547 kode pos 30146
E-mail : dishub_palembang@yahoo.co.id, Website : www.dishub.palembang.go.id

SURAT IZIN KEGIATAN

Nomor : 833 / 00632 / I

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SUPRIYANTO, ATD, MM
NIP : 196908011992031006
Pangkat/Gol : Pembina Tk.1 / IV.b
Jabatan : Sekretaris Dinas
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : TINA AFRIANTI, S.Tr. Tra
NIP : 199704132021022001
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Bendahara UPTD Perparkiran Wilayah Utara
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Palembang

Untuk melakukan kegiatan Aktualisasi (Habitulasi) Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tanggal 03 Mei 2021 s.d 09 Juni 2021 sesuai dengan program aktualisasi saudara berjudul "Optimalisasi Informasi Titik Parkir Berizin Wilayah Utara Melalui Digitalisasi Aplikasi *Map Marker* di Dinas Perhubungan Kota Palembang".

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

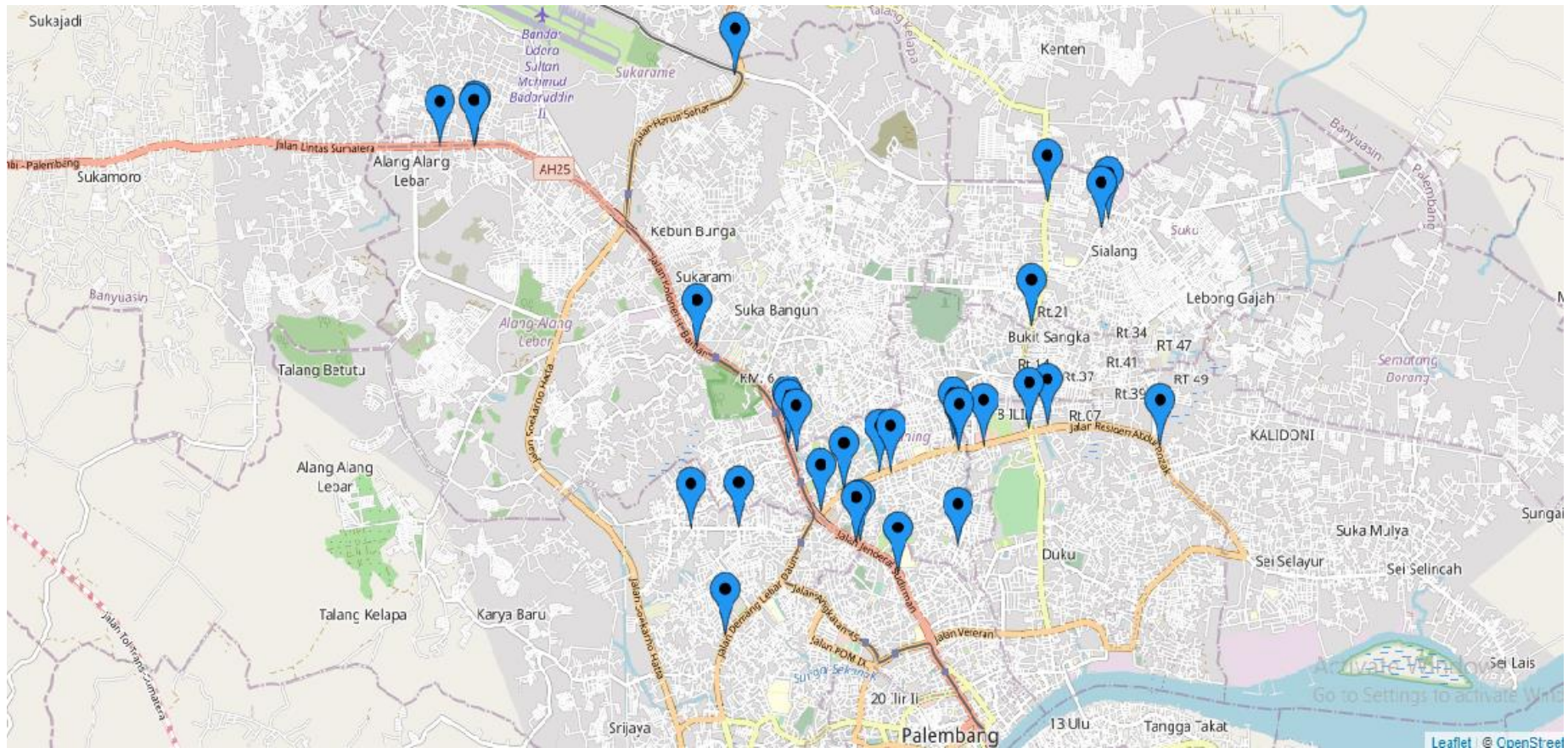
Palembang, 10 Mei 2021

An KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG
SEKRETARIS,

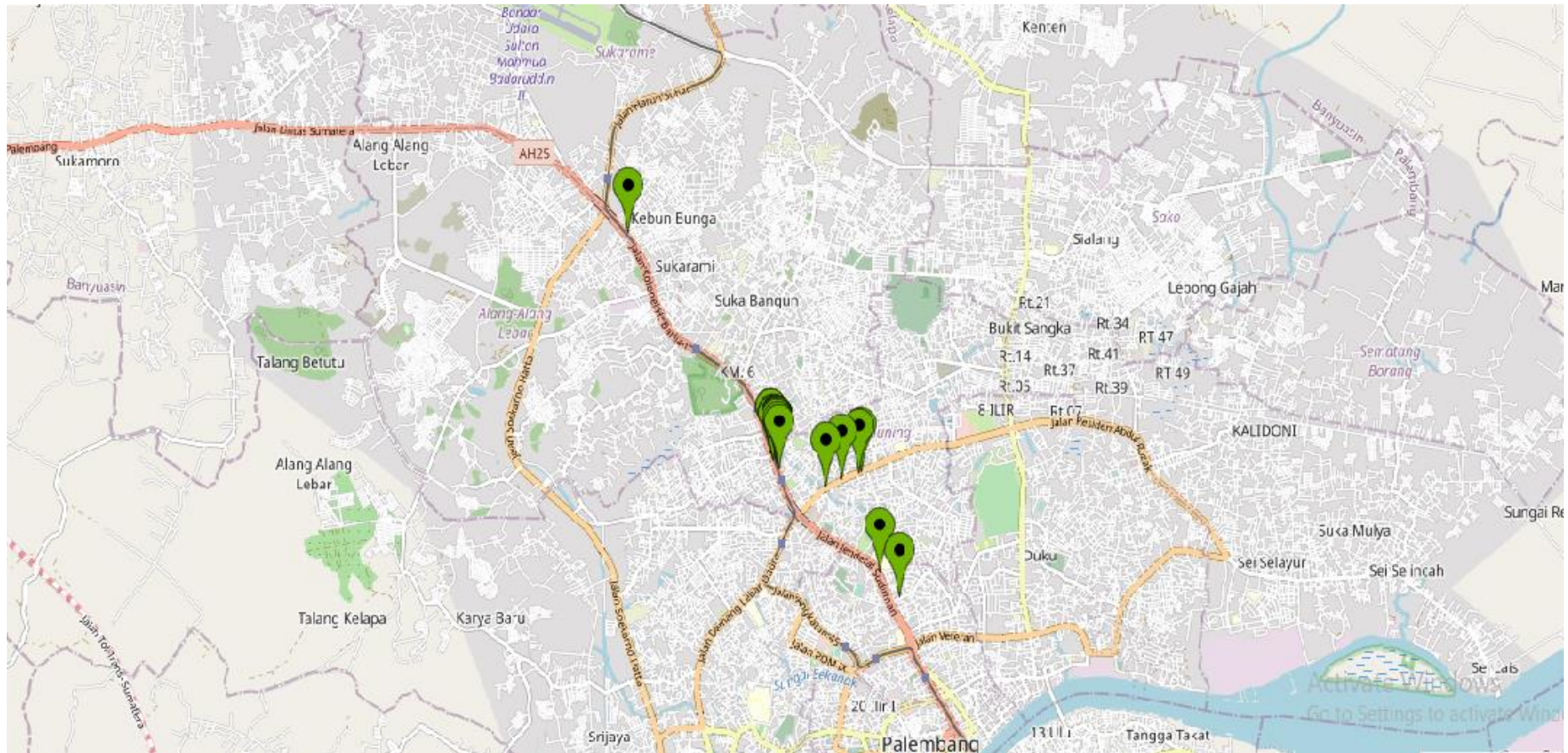


AGUS SUPRIYANTO, ATD, MM
Pembina Tk. I
NIP.196908011992031006

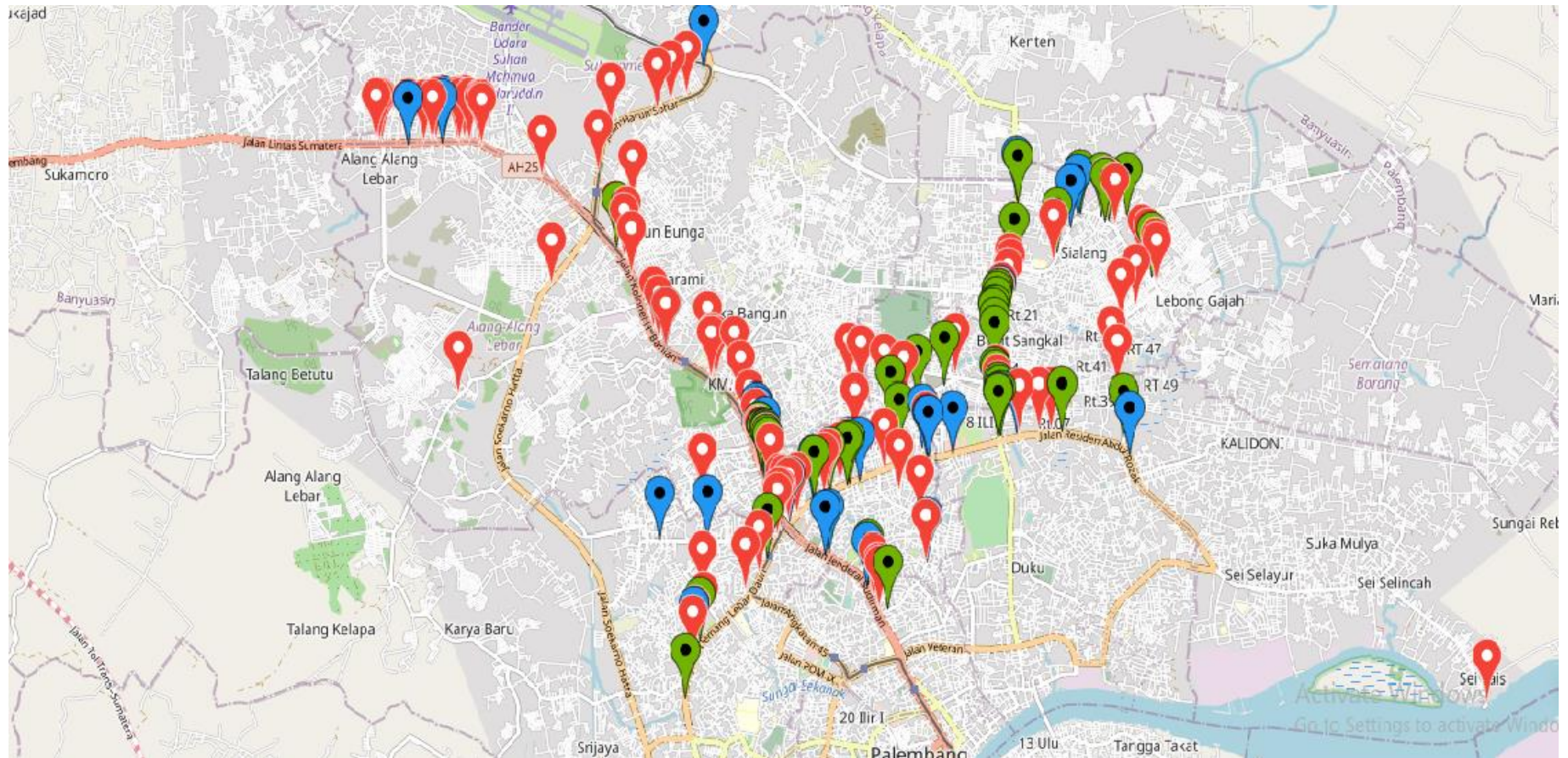
Lampiran 3 Titik Parkir Berlangganan Wilayah Utara



Lampiran 5 Titik Parkir Harian Zona 1 Wilayah Utara



Lampiran 8 Seluruh Titik Parkir Wilayah Utara



BIODATA



Nama : Tina Afrianti, S.Tr.Tra
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 13 April 1997
NIP : 199704132021022001
Golongan : III/a
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Palembang
Alamat : Jalan Tanjung Sari 1 No. 001 RT.30 RW.06,
Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni,
Palembang, Sumatera Selatan
E-mail : tinafrianti13@gmail.com
No HandPhone : 082374739493
Riwayat Pendidikan :

TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
SD	SDN 195 Palembang	2008
SMP	SMPN 38 Palembang	2011
SMA	SMAN 14 Palembang	2014
Universitas	Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD	2020